library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan alat komunikasi utama bagi manusia dalam rangka melakukan interaksi sosial secara efektif dan efisien. Selain memiliki fungsi *referensial*, bahasa yang digunakan manusia dalam kegiatan komunikasi juga memiliki fungsi *afektif* (Holmes, 1992). Fungsi referensial terkait dengan penggunaan bahasa dalam rangka bertukar informasi atau pengetahuan dengan manusia lain. Fungsi yang bersifat informatif ini memungkinkan manusia mengakumulasi dan menyebarluaskan pengetahuan tentang dunia yang ditempatinya sehingga terwujud sistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupannya seperti dewasa ini.

Fungsi afektif yang disebut juga fungsi sosial terkait dengan penggunaan bahasa oleh manusia dalam rangka memelihara hubungan sosial dengan sesamanya. Penggunaan bahasa dalam kaitan ini berhubungan erat dengan perilaku kesantunan berbahasa, yang sangat penting peranannya dalam memelihara keharmonisan hidup manusia. Berbahasa dengan santun memungkinkan manusia terhindar dari konflik dengan sesamanya sehingga tercipta pergaulan sosial yang sehat, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kesantunan berbahasa merupakan ruh kehidupan sosial manusia yang rukun, tenteram, dan damai.

Begitu pentingnya makna kesantunan dalam keharmonisan hidup manusia, banyak pakar dan peneliti bahasa menaruh perhatian pada masalah ini. Setidaknya, terdapat dua kajian kesantunan berbahasa dalam bidang pragmatik yang cukup berpengaruh. Yang pertama adalah prinsip kesantunan, yang dikemukakan oleh Leech (1983). Prinsip tersebut menekankan bahwa suatu interaksi sosial dapat bernilai santun ketika bahasa yang digunakan seseorang mencerminkan sikap arif (*tactful*), murah hati (*generous*), rendah hati (*modest*), dan simpatik (*simpathetic*).

Yang berikutnya adalah kesantunan berdasarkan konsep muka (*face*), yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson (1978). Seseorang dapat melakukan interaksi dengan santun apabila dia menunjukkan kesadaran atas muka mitra tuturnya baik muka negatif maupun muka positif. Muka negatif mengacu pada suatu citra diri seseorang yang rasional yang memiliki keinginan untuk dihargai dengan cara

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

dibebaskan dari suatu *imposisi*, yakni tekanan atau beban untuk melakukan sesuatu yang bukan didasari oleh kepentingannya sendiri sehingga ia merasa terganggu atau terkurangi kebebasannya pada tingkat tertentu. Sebaliknya muka positif mengacu pada citra diri seseorang yang memiliki keinginan untuk diterima, dihargai, atau diakui segala apa yang ia lakukan, apa yang ia miliki dan apa yang ia yakini sebagai nilai-nilai yang baik atau benar dalam kehidupannya.

Dalam pembahasan kesantunan, faktor imposisi memiliki peran sentral. Brown dan Levinson (1978) secara eksplisit menjadikan faktor *imposisi* (Rx) sebagai penentu bobot tindak mengancam muka (FTA), yang dikalkulasikan bersama-sama dengan unsur-unsur ekstralinguistik, yakni *distance* (D) dan *power* (P). Unsur jarak sosial (D) dapat diukur berdasarkan tingkat frekuensi interaksi antara penutur dan mitra tuturnya. Faktor jarak sosial bersifat eksternal karena telah terbangun sebelum terjadinya interaksi dan secara khas terkait pula dengan status relatif antarpeserta tutur, yakni unsur P seperti otoritas, status sosial atau usia yang dimiliki oleh penutur atau petutur.

Tingkat imposisi secara intrinsik terdapat pada tuturan yang mengandung ilokusi tertentu dan mengalami proses negosiasi selama interaksi berlangsung (Yule, 1996). Artinya, tingkat daya tekan yang terkandung dalam suatu tuturan dapat mencapai derajat maksimal atau minimal tergantung pada formulasi kebahasaan yang diupayakan penutur dan tingkat keakraban para peserta tutur yang terlibat dalam interaksi. Bobot FTA yang merupakan penjumlahan antara unsur P, D, dan Rx merupakan titik tolak perilaku kesantunan strategis seorang penutur yang rasional dalam upayanya menyelamatkan muka negatif maupun muka positif.

Leech (1983) juga menyatakan bahwa kesantunan negatif terkait erat dengan strategi pengungkapan tindak tutur direktif yang bersifat kompetitif. Artinya, dalam tindak tutur ini terjadi kompetisi antara apa yang ingin dicapai oleh penutur dan apa yang dituntut oleh prinsip-prinsip kesantunan. Misalnya, dalam melakukan tindak memerintah, seorang penutur harus mencapai tujuan komunikasinya dengan melanggar maksim kearifan. Pada satu sisi, agar dapat bersikap santun seorang penutur harus mematuhi maksim kearifan, yakni membuat kerugian sekecil-kecilnya atau membuat keuntungan sebesar-besarnya bagi mitra tuturnya. Pada sisi lain, dengan melakukan tindak memerintah maka pada dasarnya seorang penutur menguntungkan dirinya sendiri. Sebaliknya, si mitra tutur harus melakukan sesuatu atas kepentingan

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

penutur sehingga secara psikologis mengalami suatu kerugian. Di sinilah terjadi suatu imposisi (pembebanan atau tekanan) terhadap diri mitra tutur oleh penutur sebagai pihak pemberi perintah. Dalam keadaan dilematis seperti ini, agar tetap bisa bersikap santun, seorang penutur harus bersikap bijaksana dengan melakukan upaya pemberian kompensasi, baik bersifat psikologis maupun material terhadap mitra tuturnya.

Esensi pembahasan kesantunan oleh kedua pakar di atas tidak dapat dipisahkan dari konsep imposisi yang terkandung dalam suatu tuturan karena manifestasi bahasa yang santun itu pada hakikatnya merupakan formulasi kebahasaan yang diupayakan seseorang dalam rangka memitigasi daya impositif suatu tuturan. Dalam kaitan ini Brown dan Levinson (1978) menyebutnya sebagai tindak perbaikan (*redressive action*), yang secara kebahasaan diwujudkan dengan apa yang disebut *mitigating devices* 'peranti kesantunan'. Oleh sebab itu kajian kesantunan yang dikaitkan dengan suatu tindak tutur yang secara intrinsik bersifat impositif seperti tindak memerintah, tindak meminta atau tindak menasihati secara pragmatik merupakan langkah strategis dalam memahami perilaku kesantunan suatu masyarakat tutur.

Dalam kerangka pemikiran seperti inilah penulis berminat mengkaji perilaku kesantunan masyarakat Tengger (selanjutnya disingkat MT) melalui penyampaian tuturan impositif dalam komunikasi sehari-hari. Dengan bertolak pada penyelidikan terhadap tuturan impositif, peneliti sangat mungkin mendapatkan *portrait* tentang esensi perilaku kesantunan MT secara lebih efektif dan efisien, mengingat ruang lingkup kajian kesantunan yang begitu luas. Dalam tradisi pragmatik kajian kesantunan sering dikaitkan dengan suatu tindak tutur tertentu, terutama yang secara intrinsik mengandung daya impositif (Hymes, 1974; Basso, 1979; Wolfson, 1981; Katriel, 1985).

Dalam pada itu, tuturan impositif yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada serangkaian ujaran yang terjadi dalam suatu peristiwa tutur tertentu yang di dalamnya terdapat tindak tutur direktif yang bersifat kompetitif-impositif. Jenis tindak tutur direktif semacam ini ditemukan pada beberapa jenis ilokusi tertentu seperti seperti tindak memerintah atau melarang, tindak meminta atau memohon, dan tindak menyarankan atau menasihati.

Adapun peristilahan *impositif* diambil dari Leech yang menyatakan, "Agar istilah *directive* tidak dikacaukan dengan ilokusi-ilokusi langsung dan taklangsung

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

(*direct and indirect illocutions*), saya menggunakan istilah IMPOSITIF (IMPOSITIVE) khususnya untuk mengacu pada ilokusi kompetitif dalam kategori direktif ini" (1993:164). Dalam kutipan tersebut diketahui bahwa tindak tutur *impositif* adalah nama lain dari tindak tutur direktif yang diberikan oleh Leech (1983) untuk membedakan antara peristilahan ilokusi direktif dan peristilahan ilokusi langsung dan taklangsung yang mengacu pada hubungan antara modus gramatikal tuturan dengan fungsi komunikatifnya.

Disamping itu istilah impositif juga digunakan Leech untuk membedakan antara ilokusi direktif yang bersifat *kompetitif-impositif* dan *convivial-nonimpositif*. Kedua sub-kelompok dalam kategori tindak tutur direktif itu dibedakan oleh Leech dengan mengkontraskan dua contoh tuturan direktif, yaitu (1) *Can't you sit down?* 'Tidak bisakah anda duduk?' dan (2) *Won't you sit down?* 'Tidak bersediakah anda duduk?'. Tuturan (1) bersifat kompetitif karena mengandung unsur ketidakramahan sehingga memberikan 'beban' atau 'tekanan' bagi mitra tutur (Pt) secara psikologis. Sebaliknya, tuturan (2) tidak mengandung daya *impositif* karena mengandung unsur keramahan sehingga secara psikologis menyenangkan (*convivial*) bagi Pt.

Dalam kaitan pembahasan tentang kesantunan, Leech membuat klasifikasi tindak tutur yang didasarkan pada karakteristik sosialnya. Berbagai tindak tutur dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: (1) *competitive*, (2) *convivial*, (3) *collaborative*, dan (4) *conflictive*. Tindak tutur *competitive* bersifat negatif dan 'tidak ramah' (*discourteous*) atau cenderung mengurangi keharmonisan sosial sedangkan tindak tutur *convivial* ('ramah/menyenangkan') bersifat positif dan cenderung santun karena penggunaannya memang untuk beramah-tamah dalam suatu kegiatan komunikasi. Di antara keempat kelompok itu, hanya jenis tindak tutur *competitive* saja yang relevan untuk dikaji unsur kesantunannya karena tindak tutur tersebut bisa bernilai santun atau tidak santun tergantung cara penyampaiannya. Adapun tindak tutur *convivial*, misalnya *mengundang makan*, memiliki kecenderungan hampir selalu bernilai santun sedangkan tindak tutur *conflictive*, misalnya *mengancam*, hampir selalu bernilai tidak santun. Dengan demikian secara pragmatik kajian kesantunan terhadap kedua kelompok tindak tutur itu menjadi tidak relevan. Dalam pada itu, tindak tutur *collaborative*, misalnya *bekerjasama*, tidak bermuatan nilai kesantunan sehingga kajian kesantunan terhadapnya juga menjadi tidak relevan.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Berangkat dari kerangka teori kesantunan Leech dan Brown-Levinson di atas, pengertian tindak tutur atau ilokusi *impositif* dalam penelitian ini dapat diklarifikasi sebagai berikut. Ilokusi impositif merupakan aspek fungsi komunikatif yang dikandung oleh suatu tuturan yang memiliki daya tekan atau beban terhadap mitra tutur seperti tindak memerintah, tindak melarang, tindak meminta/ memohon, tindak menyarankan/menasihati dan sejenisnya. Daya tekan dimaksud berupa berbagai kemungkinan efek psikologis yang terjadi pada diri mitra tutur seperti (1) merasa dirugikan karena meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan perintah, mengabulkan permintaan atau mengikuti saran atau nasihat penutur, (2) merasa terganggu atau kehilangan kebebasannya pada tingkat tertentu atau terancam muka negatifnya, dan atau (3) merasa tidak nyaman untuk menolak perintah, permintaan, atau saran dari penutur karena takut dikucilkan dari pergaulan sosial atau mendapatkan stigmatisasi sebagai individu yang sombong, kikir, atau *asosial*. Derajat daya tekan dalam tuturan impositif bersifat relatif. Artinya, dapat menjadi maksimal apabila secara kebahasaan diformulasikan tanpa adanya upaya mitigasi terhadap daya tersebut (*bald on record* dalam istilah Brown dan Levinson 1978) dan dapat menjadi minimal atau terkurangi apabila diformulasikan dengan upaya mitigasi terhadap daya dimaksud (*do FTA on record with redressive action* dalam istilah Brown dan Levinson 1978).

Adapun alasan penulis memilih perilaku kesantunan MT pada penelitian ini didasarkan pada beberapa fakta sebagai berikut. Pertama, berdasarkan catatan historis, MT merupakan keturunan manusia Jawa yang hidup pada masa kerajaan Kediri pada abad IX-X, kerajaan Majapahit pada abad XIII-XVI, dan kerajaan Mataram pada abad XVII-XVIII (Arifin, 1993/94; Hefner, 1985). Sampai saat ini mereka masih mempertahankan cara-cara hidup yang cukup unik yang sarat dengan nilai-nilai religius agama Hindu dan Budha, yang dianut oleh nenek moyang orang Jawa sebelum agama Islam masuk. Upacara-upacara adat masih rutin dilaksanakan dan terpelihara dengan baik sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta dan merupakan bentuk penghormatan pada roh-roh halus dan arwah nenek moyang mereka yang diyakini masih hidup. Fakta ini menempatkan kajian kesantunan dalam penelitian ini sebagai pembanding terhadap hasil-hasil kajian perilaku kesantunan

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

masyarakat Jawa yang ada di pusat-pusat kebudayaan Jawa seperti di daerah Yogyakarta dan Surakarta.

Sejauh ini upaya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap hakikat kesantunan Jawa telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di antaranya adalah Errington (1998), yang mengkaji struktur dan gaya bahasa terkait dengan masalah-masalah etika, etiket dan kesantunan dalam masyarakat Jawa dalam perspektif semiotik dan etika bahasa. Ada pula Smith-Hefner (1988), yang mengkaji gejala kesantunan terkait dengan kebiasaan wanita Jawa. Selain peneliti manca, ada pula beberapa peneliti domestik yang tertarik pada masalah serupa. Di antaranya adalah Kuntarto (1999), yang mengkaji strategi kesantunan dwibahasawan Indonesia-Jawa pada wacana lisan bahasa Indonesia; Gunarwan (1992;1994), yang mengkaji persepsi kesantunan di kalangan etnik Jawa di Jakarta terhadap realisasi tindak tutur *direktif*; Dwiraharjo (1991; 1997), yang mengkaji menelaah kesantunan dan kaitannya dengan bentuk tingkat tutur *krama* dalam bahasa Jawa; dan Suwadji (1985), yang mengkaji bentuk-bentuk kesantunan dalam bahasa Jawa.

Beberapa kajian terhadap kesantunan Jawa tersebut terpusat pada kebudayaan Jawa di daerah Yogyakarta dan Surakarta, yang merupakan representasi masyarakat Jawa modern. Oleh karena itu, kajian-kajian tersebut sangat mungkin menghasilkan deskripsi teoretis kesantunan orang Jawa modern yang telah berasimilasi dengan kebudayaan lain. Kajian kesantunan orang Jawa di daerah terisolasi seperti di pegunungan Tengger yang relatif tidak terpengaruh budaya kota dan masih memegang nilai-nilai Jawa kuno bisa menghasilkan deskripsi kesantunan Jawa yang masih murni.

Fakta lain menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran perilaku berbahasa di kalangan masyarakat Jawa, terutama di kalangan generasi mudanya (Dwiraharjo, 1991; Hartati, 1996). Menurut Soebroto (2006), kondisi memprihatinkan tersebut setidaknya dipicu oleh dua hal. Pertama, terjadinya himpitan ‘alami’ terhadap bahasa Jawa, yang memang hidup di dalam situasi *diaglossia*. Artinya, dalam masyarakat Jawa, bahasa Jawa digunakan secara berdampingan dengan bahasa lainnya dalam komunikasi, yakni bahasa Indonesia, dan kedua bahasa itu masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Dalam kenyataan seperti itu kedudukan bahasa Jawa, yang cenderung digunakan dalam situasi tidak resmi, dibandingkan bahasa Indonesia, memiliki posisi R (rendah atau *low*). Kenyataan ini berimplikasi pada sikap generasi

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

muda Jawa yang merasa bahwa menguasai bahasa Indonesia lebih *prestigious* dan menguntungkan daripada menguasai bahasa Jawa. Kedua, terjadinya kebocoran *diaglossic* dalam masyarakat Jawa, yakni tidak digunakannya bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari di kalangan penutur jati bahasa Jawa itu sendiri. Keadaan ini semakin menjauhkan generasi muda Jawa dari bahasa Jawa.

Dalam kaitan inilah kajian kesantunan MT ini memiliki peran strategis. Di samping dapat digunakan untuk mendapatkan deskripsi kesantunan masyarakat Jawa *relic* seperti MT, *by-product* penelitian ini juga dapat memberikan deteksi dini apakah keadaan serupa juga terjadi di kalangan MT. Apabila terjadi hal serupa, maka penelitian ini dapat berfungsi sebagai *alarm* terhadap pentingnya pelestarian bahasa dan budaya Jawa yang mutlak diperlukan. Bahasa Jawa bukan sekedar berfungsi sebagai alat penyampai pesan dalam komunikasi tetapi dengan sistem tingkat tuturnya, bahasa Jawa berfungsi sebagai pembentuk kepribadian manusia Jawa, yang penuh rasa hormat terhadap orang lain, *andap asor, empan-papan, aja dumeh, tepa slira, tanggap ing sasmita* dan sebagainya (Ngadiman, 2006).

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan teori kesantunan, perilaku kesantunan MT secara *epistemologis* merupakan salah satu wahana yang tepat untuk menguji salah satu bagian konstruksi teori kesantunan berbahasa, terutama Brown dan Levinson (1978/87). Pada intinya, konstruksi teori kesantunan tersebut berpusat pada konsep *muka negatif*, yakni keinginan untuk bebas, dan *muka positif*, yakni keinginan untuk dihargai, disukai dan diterima secara sosial. Konsep *muka negatif* dalam teori kesantunan itu tampak lebih cenderung berorientasi pada budaya masyarakat barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan individu.

Menurut hemat peneliti, perilaku kesantunan MT sebagai representasi budaya timur sangat tepat dikaji untuk mem*verifikasi* kesahihan proposisi-proposisi teoretis dalam teori Brown dan Levinson. Salah satu contoh proposisi teoretis yang patut diuji adalah tentang tindak mengancam muka (*face threatening act*). Brown dan Levinson memberikan suatu daftar yang berisi berbagai tindak tutur mengancam muka, baik muka negatif, muka positif, atau keduanya secara bersamaan (1978/87:65-66). Salah satu kelompok tindakan yang dinyatakan mengancam muka negatif petutur (Pt) antara lain adalah tindakan-tindakan yang secara intrinsik memberikan tekanan pada Pt untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan T atas keinginan penutur (Pn).

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Contohnya adalah (1) tindak memerintah (*orders*) dan memohon (*request),* (2) tindak menyarankan (*suggestion*) atau menasihati (*advice),* (3) tindak mengingatkan (*reminding*), dan (4) tindak mengancam (*threat*), memperingatkan *warning*), menantang (*dares*).

Tipe tindak tutur (4) di atas barangkali masih *valid* jika dikatakan mengancam muka karena semua individu normal dari kelompok masyarakat manapun akan merasa terganggu apabila diancam, diperingatkan, atau ditantang. Namun apakah tipe tindak tutur (1), (2), dan (3) juga selalu mengancam muka sekelompok orang Jawa yang tinggal di pegunungan Tengger, yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya Jawa kuno?

Suseno (1988) mengemukakan bahwa dalam bersikap dan bersosialisasi secara umum orang Jawa berpedoman pada prinsip-prinsip dasar antara lain *prinsip rukun* dan *prinsip hormat.* Suatu wujud perilaku orang Jawa yang didasari prinsip rukun adalah kebiasaan melakukan pekerjaan secara gotong-royong dalam membangun sarana untuk kepentingan umum maupun sarana untuk kepentingan pribadi seperti tempat tinggal. Bantu-membantu, menolong dan ditolong adalah bagian dari perilaku keseharian yang dinilai sebagai sesuatu yang baik dalam masyarakat Jawa pedesaan. Bahkan, ada sebagian orang Jawa yang merasa tersinggung justru ketika tidak dimintai pertolongan, bukan sebaliknya. Dalam budaya masyarakat Jawa, masih relevankah beberapa tindak tutur direktif yang digolongkan sebagai tindak mengancam muka negatif dalam teori kesantunan Brown dan Levinson? Jika masih relevan, dalam kondisi-kondisi sosial seperti apa tindak tutur-tindak tutur tersebut dianggap mengancam muka? Apakah perilaku kesantunan berbahasa itu memang memiliki kesamaan universal ataukah bersifat khas dan unik? Faktor-faktor sosial-budaya apa saja yang mempengaruhi keunikan dan kekhasan perilaku kesantunan etnis tertentu? Menurut hemat penulis, pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat dijawab secara langsung atau tidak langsung melalui kajian-kajian perilaku kesantunan komunitas Jawa yang bertempat tinggal di daerah terpencil seperti komunitas Tengger.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 'Bagaimana realisasi kesantunan berbahasa di kalangan masyarakat suku Tengger dalam melakukan tindak tutur impositif?' Selanjutnya pertanyaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud tuturan impositif di kalangan masyarakat Tengger?
2. Bagaimana peranti-peranti kesantunan berbahasa digunakan untuk melunakkan daya ilokusi dalam tuturan impositif di kalangan masyarakat Tengger?
3. Bagaimana strategi kesantunan yang digunakan masyarakat Tengger dalam menyampaikan tuturan impositif?
4. Mengapa warga masyarakat Tengger memilih strategi kesantunan tertentu dalam penyampaian tuturan impositif? Adakah kaitan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Tengger dengan perilaku kesantunan berbahasa mereka, khususnya dalam menyampaikan tuturan impositif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku kesantunan berbahasa masyarakat suku Tengger, khususnya yang terkait dengan penyampaian tuturan impositif. Secara khusus, tujuan-tujuan di dalam penelitian ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. memerikan wujud tuturan impositif di kalangan masyarakat Tengger.
2. memerikan penggunaan peranti-peranti kesantunan berbahasa yang digunakan untuk melunakkan daya ilokusi dalam tuturan impositif di kalangan masyarakat Tengger.
3. memerikan penggunaan strategi kesantunan yang digunakan masyarakat Tengger dalam meyampaikan tuturan impositif.
4. menjelaskan mengapa warga masyarakat Tengger memilih strategi kesantunan tertentu dalam menyampaikan tuturan impositif dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial budaya yang mereka miliki.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoretis, hasil kajian penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang wujud, peranti, dan strategi kesantunan serta hubungan antara tata nilai sosial-budaya masyarakat tersebut dengan perilaku kesantunan mereka, khususnya dalam menyampaikan tindak tutur impositif. Dengan menggunakan metode etnografi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerangan yang lebih komprehensif tentang hakikat kesantunan berbahasa. Kajian kesantunan dalam latar budaya yang khusus ini diharapkan melengkapi kajian-kajian kesantunan yang diklaim berlaku secara universal oleh beberapa pakar kesantunan seperti Brown dan Levinson (1978).

Terkait dengan terbatasnya kajian kesantunan berbahasa suatu etnis di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian-penelitian lanjutan tentang permasalahan serupa dengan meragamkan latar budaya yang berbeda-beda yang dimiliki oleh berbagai etnis dan suku yang berdiam di tanah air kita. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khasanah pengetahuan tentang kesantunan yang terkait dengan berbagai norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam salah satu masyarakat tutur tertentu di nusantara. Tersedianya kepustakaan yang memadai tentang deskripsi empiris perilaku kesantunan berbahasa berbagai etnis di nusantara dapat mendorong perluasan wawasan berbagai lapisan masyarakat nasional maupun internasional tentang kekhasan dan keunikan perilaku berbahasa berbagai suku atau etnis di negara kita. Dari sini, diharapkan munculnya toleransi, penghormatan dan saling pengertian yang tinggi terhadap tata cara berkomunikasi antar individu-individu yang berasal dari kelompok etnis dengan latar budaya berlainan. Hal ini akan berdampak positif terhadap terciptanya tata pergaulan masyarakat nasional maupun internasional yang sehat sehingga pada akhirnya terbina perdamaian dunia yang hakiki.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari (1) tinjauan pustaka, yang mebahas beberapa temuan hasil penelitian tentang kesantunan yang telah dilakukan sebelumnya, (2) landasan teori, yang membahas konsep-konsep teoretis terkait masalah atau variabel yang dikaji dalam penelitian ini dan (3) kerangka berpikir, yang menjadi arah dari penelitian ini.

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada bab ini mengulas secara singkat intisari beberapa temuan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, terutama yang berhubungan dengan kajian kesantunan yang mengandung aspek kultural atau latar belakang budaya masyarakat tertentu untuk mengetahui seberapa jauh kajian terkait topik tersebut telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantara sekian banyak penelitian kesantunan, penulis sengaja memilih beberapa penelitian yang gayut dengan topik yang sedang diteliti.

Kajian kesantunan terkait masyarakat tutur di Asia yang cukup berpengaruh adalah penelitian yang dilakukan oleh Ide (1982; 1989a; 1989b) yang mengkaji kesantunan masyarakat Jepang. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pada dasarnya kesantunan merupakan upaya untuk memelihara komunikasi yang lancar. Kesantunan dalam masyarakat Jepang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk kebahasaan yang tidak netral secara sosial. Penutur bahasa Jepang harus selalu memilih antara bentuk-bentuk *honorifik* (bentuk yang menunjukkan penghormatan) atau *non-honorifik* sedemikian rupa sehingga bahasa yang digunakan pada dasarnya selalu menyampaikan informasi tentang hubungan penutur-petutur. Dengan demikian penggunaan bentuk-bentuk honorifik bersifat mutlak dan tidak berkaitan dengan kehendak bebas penutur (*volition*) tetapi lebih terkait dengan kearifan (*discernment).* Dia mengklaim bahwa kearifan merupakan komponen kedua yang sangat menonjol di masyarakat Jepang. Kearifan tidak bersifat *volitional*, dalam pengertian bahwa pemilihan bentuk-bentuk linguistik yang santun tidak tergantung pada kehendak bebas penutur tetapi merupakan pilihan-pilihan gramatikal yang memiliki kewajiban sosial dan ditentukan oleh konvensi-konvensi sosial dalam masyarakat tersebut.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Perilaku kesantunan dalam masyarakat Jepang dikenal dengan istilah *wakimae*, yang berarti berperilaku secara verbal dengan menunjukkan rasa terhadap tempat dan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam situasi tertentu berdasarkan konvensi-konvensi sosial yang mengaturnya (Ide, 1989b). Secara umum terdapat empat kaidah sosial umum yang berhasil diidentifikasi, yakni (1) bersikap santunlah kepada orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi, (2) bersikaplah santun kepada orang yang memiliki kekuasaan, (3) bersikaplah santun kepada orang yang lebih tua; dan (4) bersikaplah santun dalam suatu lingkungan resmi (derajat keresmian ditentukan oleh faktor-faktor peserta tutur, topik dan kesempatan).

Secara umum Ide (1982) berkesimpulan bahwa dalam bahasa Jepang dan bahasa-bahasa lain dengan sistem honorifik yang berkembang kuat di dalamnya memiliki kaidah-kaidah kesantunan yang terkait secara kuat dengan kaidah-kaidah gramatikal, yang merupakan bagian dari bahasa itu sendiri. Kaidah-kaidah itu juga ditentukan oleh karakteristik-karakteristik sosio-kultural penutur dan petutur serta situasi komunikasi, yang kesemuanya tercermin dalam pilihan-pilihan linguistik penutur. Pendek kata, kesantunan dalam bahasa Jepang lebih dari sekedar upaya strategis penutur dalam rangka mencapai kesesuaian verbal dalam berkomunikasi agar dapat memperlakukan pentutur dengan baik tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bahasa yang dipakai guna mencapai kesesuaian sosio-struktural.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Blum-Kulka (1992) terhadap kesantunan masyarakat Yahudi Israel. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada dasarnya kesantunan itu terkait erat dengan budaya (*culturally-determined*). Jadi ia bersifat relatif terhadap budaya yang berbeda-beda bukan bersifat universal seperti yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson (1978). Menurut Blum-Kulka perbedaan antara penggunaan bahasa yang bersifat wajib (*obligatory*) dan yang bersifat strategis secara budaya memiliki cakupan dan kedalaman yang berbeda.

Masyarakat Israel-Yahudi, yang digunakan sebagai subyek penelitian, memandang kesantunan sebagai perilaku sosial yang dianggap patut dan ditentukan oleh harapan-harapan dan norma-norma kultural dalam suatu masyarakat. Berdasarkan penelitian inilah Blum-Kulka membuat istilah norma budaya (*cultural norms)* dan naskah budaya *(cultural scripts)* dalam pendekatan teorinya. Kedua istilah tersebut mengacu pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah konvensional yang dijadikan

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

dasar oleh anggota suatu masyarakat dalam upaya menentukan kesesuaian strategi verbal tertentu dengan konteks tertentu dalam suatu peristiwa komunikasi.

Sejalan dengan Ide, Blum-Kulka menggarisbawahi bahwa terdapat pembedaan antara pilihan-pilihan linguistik yang bersifat strategis dan pilihan-pilihan yang bersifat wajib, yang terikat oleh konvensi-konvensi kultural dengan kedalaman yang berbeda-beda dalam masing-masing kebudayaan. Menurut Blum-Kulka, kearifan (*discernment*) mengacu pada bagian kesantunan konvensional, dan dalam hal ini kesantunan dibakukan dalam konvensi sosial yang ketat. Dalam masyarakat tertentu, seperti Yahudi-Israel penggunaan bahasa dengan strategi kearifan terikat lebih kuat pada konvensi sosial tersebut daripada pada penggunaan bahasa dengan strategi kehendak (*volition*) yang tinggi.

Dinyatakan pula bahwa sistem kesantunan sangat terkait dengan interpretasi yang disaring secara kultural dari interaksi antara (1) *motivasi sosial*, yang mengacu pada fungsionalitas kesantunan atau pada faktor-faktor yang mendorong seseorang bersikap santun; (2) bentuk-bentuk ungkapan kebahasaan (*expressive modes*), yang menunjuk pada bentuk-bentuk linguistik yang digunakan untuk mengungkapkan kesantunan; (3) perbedaan status sosial (*social differentials*), yang mengacu pada parameter penilaian situasi yang memainkan peran dalam kesantunan seperti faktor-faktor yang dikemukakan Brown dan Levinson, yakni kuasa (*power*=P), jarak sosial (*distance*=D), dan hubungan (*relationship*=R) dan (iv) makna sosial, mengacu pada nilai kesantunan pada ungkapan–ungkapan kebahasaan tertentu yang dipakai dalam konteks situasi tertentu.

Penelitian lain dilaksanakan oleh Sifianou (1992a, 1992b, 1993), yang merupakan gagasan kesantunan lintas-kultural antara kesantunan bahasa Inggris dan Yunani. Dengan menggabungkan unsur-unsur kesantunan Brown dan Levinson, Ide Lakoff (1990), Ardnt dan Janney (1985b) serta Fraser dan Nolen (1981) yang dilandasi konsep teoretik dari Goffman (1956), ia menyimpulkan perlunya pembedaan antara ‘penghormatan’, yakni perilaku kebahasaan untuk tujuan penghargaan kepada orang lain dan kaidah ‘substansi’, yang mengacu pada nilai-nilai moral dan etika, dan kaidah ‘seremonial’, yang mengacu pada alat komunikasi konvensional.

Penelitian kesantunan juga telah dilaksanakan di Indonesia, terutama terhadap masyarakat Jawa sebagaimana dilakukan oleh Errington (1998). Ia mengkaji struktur

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

dan gaya bahasa terkait dengan masalah-masalah etika, etiket dan kesantunan dalam masyarakat Jawa dalam perspektif semiotik dan etika bahasa. Terdapat pula kajian tentang gejala kesantunan yang dikaitkan dengan kebiasaan wanita Jawa, yang dilakukan oleh Smith-Hefner (1988).

Beberapa peneliti nasional juga telah mengkaji kesantunan Jawa dengan fokus kajian yang berbeda. Diantaranya adalah Dwiraharjo (1991), yang mengkaji kesantunan Jawa dengan fokus kajian pada bentuk tingkat tutur *krama* dalam bahasa Jawa di kalangan generasi muda. Ia berkesimpulan bahwa penguasaan generasi muda Jawa terhadap tingkat tutur *krama* cukup memprihatinkan. Hal ini sekaligus memicu terjadinya gejala menipisnya pemahaman mereka terhadap unggah-ungguh dan menipisnya penghayatan terhadap nilai-nilai budaya dan kesantunan Jawa pada umumnya.

Adapun kajian kesantunan yang dikaitkan dengan tindak tutur impositif telah dilakukan oleh Kuntarto (1999). Secara khusus ia mengkaji strategi kesantunan dalam menyampaikan tindak tutur impositif yang dilakukan oleh dwibahasawan Jawa yang bertempat tinggal di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dwibahasawan Jawa-Indonesia cenderung menggunakan strategi kesantunan ketidaklangsungan disamping strategi-strategi lain. Menurut peneliti ini, pemilihan strategi-strategi yang dipilih oleh dwibahasawan Jawa tersebut dimotivasi oleh prinsip-prinsip yang khas, yakni Prinsip Hormat dan Prinsip Rukun. Disimpulkan pula bahwa masyarakat dwibahasawan Jawa-Indonesia adalah individu-individu yang monokultural.

Berbeda dengan beberapa kajian kesantunan yang dibahas di atas, kajian kesantunan dalam penelitian ini terfokus pada kesantunan masyarakat Tengger yang berlatar sub-kultur Jawa yang bersifat *relic*. Artinya, penelitian ini berupaya mendeskripsikan perilaku kesantunan sekelompok manusia Jawa tradisional yang masih memegang teguh nilai-nilai sosial budaya Jawa kuno yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Fokus penting penelitian ini, yaitu cara-cara verbal yang dilakukan MT dalam menyampaikan tuturan impositif, belum pernah dikaji sebelumnya. Di samping itu, dengan pendekatan etnografis penelitian ini berupaya melihat pengaruh nilai-nilai sosial budaya MT terhadap berbagai pola kebahasaan tuturan impositif yang mereka gunakan.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

B. Kajian Teori

Kajian kesantunan dalam tuturan impositif di kalangan MT ini merupakan bagian dari kajian pragmatik. Untuk itu, bagian ini membahas beberapa konsep teoretis di dalamnya yang relevan dengan arah kajian dalam penelitian ini. Secara umum, kajian pragmatik dirintis pada tahun 1930-an oleh Morris, Carnap, dan Peirce, yang mengemukakan bahwa pragmatik merupakan bagian dari semiotika, yaitu ilmu tentang tanda. Pragmatik berkembang pesat ketika Grice (1967) mengetengahkan prinsip kerjasama yang merupakan momentum penting pengembangan kerangka kerja sistematis dalam ilmu pragmatik.

Dalam kaitannya dengan linguistik, semiotika mencakup sintaksis, semantik, dan pragmatik (Morris, 1938; Carnap, 1937; 1942). Sintaksis merupakan cabang semiotika yang mengkaji hubungan formal antar tanda dalam sistem bahasa, semantik mengkaji hubungan tanda dengan objek yang diacunya, dan pragmatik mengkaji hubungan tanda dengan pengguna bahasa.

Batasan yang diberikan oleh para pakar tentang kajian pragmatik itu sendiri sejauh ini cukup beragam. Namun demikian, kebanyakan pakar mendefinisikan pragmatik sebagai kajian tentang makna dalam kaitannya dengan konteks. Horn dan Ward (2004:xi) mendefinisikan pragmatik sebagai *'the study of those context-dependent aspects of meaning which are systematically abstracted away from in the construction of content and logical form* ('Pragmatik merupakan kajian tentang berbagai aspek makna yang terikat konteks, yang diabstraksikan secara sistematis dalam rangka membangun isi dan bentuk logis'). Mey (1993:42) menyatakan bahwa pragmatik adalah *the study of conditions of human language uses as these are determined by the context of society* ('kajian tentang berbagai kondisi penggunaan bahasa manusia sebagaimana kondisi-kondisi tersebut ditentukan oleh konteks masyarakatnya').

Pemahaman tentang pragmatik dapat diperjelas dengan memahami perbedaan antara semantik dan pragmatik dalam mengkaji makna bahasa. Menurut Leech (1983), makna yang dikaji dalam semantik terfokus pada pertanyaan 'Apa makna X?' sedangkan makna yang dikaji dalam pragmatik terfokus pada pertanyaan 'Apa yang anda maksud dengan X?'. Dengan demikian, semantik mengkaji makna lingual yang

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

bersifat bebas konteks atau tidak terikat konteks sedangkan pragmatik mengkaji makna atau maksud tuturan yang bersifat terikat konteks (Subroto, 2011:10).

Adapun ranah kajian pragmatik menurut Horn dan Ward (2007) secara tradisional mencakup pembahasan tentang (1) implikatur, (2) presuposisi, (3) tindak tutur, (4) referensi, (5) deixis, dan (6) *definiteness* dan *indefiniteness.* Hal senada dikemukakan oleh Stalnaker (1973) yang menyatakan bahwa *pragmatics is the study of deixis (at the least part), implicature, presupposition, speech acts, and aspects of discourse structure* ('pragmatik adalah kajian yang setidaknya mencakup deiksis, implikatur, presuposisi, tindak tutur, dan aspek-aspek struktur wacana').

Dalam kaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti meninjau beberapa konsep teoretis pragmatik yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah kesantunan dan tindak tutur impositif. Konsep-konsep teoretis tersebut antara lain meliputi retorika interpersonal, konteks, implikatur, tindak tutur, ilokusi impositif, kesantunan, dan budaya sebagai acuan dalam penelitian ini. Masing-masing konsep teoretis tersebut dipaparkan pada beberapa sub-bab berikut ini.

1. Retorika Interpersonal

Salah satu hasil cipta-karya budaya yang khas dalam dunia manusia adalah bahasa, yang berfungsi sebagai alat komunikasi utama bagi manusia dalam rangka melakukan interaksi dengan sesamanya secara efektif dan efisien. Menurut Holmes (2001: 259), bahasa yang dipakai dalam kegiatan komunikasi itu memiliki dua fungsi, yakni fungsi *referensial* dan fungsi *afektif*. Fungsi yang pertama terkait dengan penggunaan bahasa dalam rangka bertukar informasi atau pengetahuan dengan manusia lain. Fungsi, yang disebut juga sebagai fungsi informatif ini, memungkinkan manusia untuk mengakumulasi dan menyebarluaskan cara-cara memecahkan berbagai masalah yang timbul berhubungan dengan alam yang ditempatinya. Sejauh ini, kegiatan manusia dalam bertukar informasi dan pengetahuan dengan sesamanya telah sampai pada taraf signifikan, yakni terwujudnya sistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat berguna bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupannya.

Fungsi afektif yang disebut juga fungsi sosial terkait dengan penggunaan bahasa oleh manusia dalam rangka memelihara hubungan sosial dengan sesamanya. Dalam hal ini, bahasa digunakan dalam kegiatan interaksi sosial oleh manusia dalam rangka mengenal individu lain, membina keakraban, mengadakan kerjasama,

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

mengungkapkan empati, dan sebagainya. Tampaknya, tujuan penggunaan bahasa untuk bersosialisasi itu memiliki arti sama pentingnya dengan tujuan penggunaan bahasa untuk bertukar informasi. Penggunaan bahasa dalam rangka membina hubungan sosial berimplikasi pada terciptanya keharmonisan dan perdamaian sosial.

Terkait dengan kedua fungsi bahasa yang mempunyai implikasi luas di dalam kehidupan manusia tersebut, para pakar pragmatik pada umumnya sepakat bahwa interaksi verbal antar manusia diatur oleh prinsip-prinsip retorika dalam ranah penggunaan bahasa. Secara tradisional, istilah retorika mengacu pada kajian tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam berkomunikasi, khususnya terkait dengan seni kemahiran atau ketrampilan menggunakan bahasa untuk tujuan-tujuan berpidato, persuasi, maupun kesusasteraan. Namun dalam perspektif kajian pragmatik, istilah retorika digunakan untuk mengacu pada seperangkat prinsip percakapan atau prinsip berkomunikasi yang diikuti oleh seorang penutur dalam rangka menghasilkan suatu efek tertentu pada benak (*mind*) mitra tuturnya dalam situasi ujar tertentu (Leech, 1983).

Leech (1983) membedakan retorika menjadi dua kategori, yakni (1) retorika tekstual dan (2) retorika interpersonal. Yang pertama mengacu pada seperangkat prinsip yang terdiri dari empat prinsip yang masing-masing terdiri dari sejumlah maksim. Secara singkat, keempat prinsip tersebut terdiri dari prinsip prosesibilitas, prinsip kejelasan, prinsip ekonomi, dan prinsip keekspresian. Oleh karena penelitian ini difokuskan pada fenomena kesantunan yang cenderung bersifat interaksional, maka pembahasan yang lebih mendalam tentang jenis retorika ini akan dirasakan kurang relevan. Dalam pada itu, retorika yang kedua juga mengacu pada seperangkat prinsip yang juga dijabarkan menjadi beberapa maksim. Sejauh ini, seperangkat prinsip-prinsip yang diklasifikasikan sebagai retorika interpersonal adalah (1) prinsip kerjasama, (2) prinsip kesantunan, dan (3) prinsip ironi. Ketiga prinsip dimaksud akan dibahas secara lebih rinci pada bagian berikut ini.

a. Prinsip Kerjasama

Salah satu prinsip retorika dalam penggunaan bahasa adalah Prinsip Kerjasama (PK). Prinsip yang dikemukan oleh Grice (1975) ini menjelaskan bahwa pada dasarnya pertukaran informasi dalam suatu percakapan antarmanusia dapat

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

berlangsung efektif dan efisien karena para peserta tutur diasumsikan saling bekerja sama. PK didasari oleh suatu pandangan bahwa para peserta tutur dapat terlibat dalam suatu kegiatan komunikasi yang efektif apabila mereka mengikuti pola-pola yang mengatur hak dan kewajiban penutur dan petutur dalam suatu interaksi.

Pola-pola tersebut dirumuskan oleh Grice, yang memandang bahwa pada hakikatnya suatu kegiatan percakapan dipenuhi oleh usaha-usaha untuk menyamakan unsur-unsur pada transaksi kerjasama, yakni: (1) menyamakan tujuan jangka pendek meskipun tujuan itu pada awalnya berbeda atau bahkan bertentangan, (2) menyatukan sumbangan peserta tutur sehingga terjadi suatu keadaan yang saling membutuhkan di antara mereka, (3) mengusahakan agar penutur dan petutur memiliki pemahaman bahwa transaksi berlangsung dengan suatu pola tertentu yang cocok, kecuali apabila para peserta tutur bermaksud mengakhiri kerjasama. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, Grice merumuskan suatu pola kerjasama yang kemudian dikenal sebagai PK.

Secara singkat, PK Grice berbunyi, 'Buatlah sumbangan percakapan Anda sebagaimana diperlukan menurut tujuan dan arah percakapan yang disepakati dan yang sedang Anda ikuti' (Grice, 1975). Selanjutya PK dimaksud dijabarkan menjadi empat maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan dan maksim cara. Masing-masing maksim tersebut dijabarkan lebih rinci menjadi beberapa sub-maksim sebagai berikut:

(1) Maksim Kuantitas: Berilah informasi yang tepat.
   (a) Buatlah sumbangan Anda seinformatif yang dibutuhkan.
   (b) Jangan membuat sumbangan Anda lebih informatif daripada yang dibutuhkan.
(2) Maksim Kualitas: Buatlah sumbangan Anda sebagai sesuatu yang benar.
   (a) Jangan mengatakan apa yang Anda yakini salah.
   (b) Jangan mengatakan sesuatu yang Anda tidak mengetahui sumbernya.
(3) Maksim Hubungan: Usahakan agar sumbangan Anda ada relevansinya.
(4) Maksim Cara: Usahakan agar sumbangan Anda mudah dipahami.
   (a) Hindari pernyataan yang samar.
   (b) Hindari ketaksaan.
   (c) Usahakan agar ringkas.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

(d) Usahakan berbicara dengan teratur. [Diadaptasi dari Grice, 1975]

Dalam kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara efektif dan terciptanya wacana percakapan yang wajar, kepatuhan terhadap maksim-maksim dalam PK diperlukan. Mematuhi maksim-maksim PK dalam interaksi verbal berarti menyusun bentuk ujaran-ujaran yang digunakan dalam percakapan secara informatif (tidak lebih dan tidak kurang), benar (bukan suatu kebohongan), relevan (nyambung dengan topik pembicaraan), sesingkat mungkin, tidak taksa (tidak mengandung interpretasi ganda) dan sitematis. Jika ini dapat dilakukan oleh seorang penutur, maka akan terjadi suatu kejelasan pragmatik (*pragmatic clarity)* yang berkadar paling tinggi dan menjamin proses pertukaran informasi berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Prinsip Kesantunan

Di sisi lain, dalam menggunakan bahasa, manusia tidak hanya membutuhkan pertukaran informasi tetapi sesekali mereka ingin berkomunikasi dengan tujuan menjaga ketentraman dan kedamaian suasana sosial dengan berusaha tidak menyinggung perasaan orang lain. Untuk itulah, menurut Leech (1983), kajian pragmatik masih memerlukan satu jenis retorika interpersonal yang dikenal sebagai Prinsip Kesantunan (PS). PS merupakan komplemen retorika interpersonal yang mutlak diperlukan untuk dapat menjelaskan secara tuntas terhadap masalah-masalah yang tidak dapat dijelaskan melalui PK secara memuaskan, terutama dalam menjelaskan hubungan antara makna proposisional dan daya pragmatik ujaran yang muncul.

Dengan PS masalah-masalah yang timbul dalam suatu percakapan dimana penutur melanggar PK akan dapat dijelaskan secara lebih rasional. Dalam suatu percakapan, misalnya:

A: Kamu mengundang Anton dan Ali? (1)
B: Ya, saya mengundang Anton. (2)

Ditinjau dari prinsip kerjasama, tuturan (2) mengisyaratkan adanya ketidakpatuhan terhadap maksim kuantitas karena B tidak mencukupkan informasinya. Namun dilihat dari sisi semantik, ketidakcukupan informasi tersebut disebabkan proposisi yang terbentuk dalam ujaran B hanya terbatas pada '*saya*

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

mengundang Anton' dan tidak ada proposisi yang menginformasikan tentang *'apakah Ali diundang juga*'. Terhadap gejala penggunaan bahasa seperti ini, Grice (1975) mengemukakan bahwa B berusaha mengkomunikasikan makna non-proposisional yang disebut *implikatur*, yakni makna yang dikomunikasikan tetapi tidak dikatakan. Jadi, dari perilaku berbahasa B di atas dapat ditarik suatu implikatur, yakni: '*tapi saya tidak mengundang Ali*'.

Dalam percakapan di atas, B sebenarnya dapat memberikan informasi yang lengkap dan utuh perihal undangannya terhadap Anton dan Ali. Yang menjadi pertanyaan ialah mengapa B memilih menginformasikan nasib Ali terkait undangan tersebut melalui implikatur alih-alih eksplikatur? Alasan yang paling masuk akal adalah B memilih bersikap santun terhadap petuturnya atau pihak ketiga, Ali. Dengan demikian B lebih memilih mematuhi PS dalam rangka menjaga keharmonisan sosial dengan mitra tuturnya atau pihak ketiga. Fenomena penggunaan bahasa semacam inilah yang terkait dengan perilaku kesantunan berbahasa.

Sebagaimana PK, PS ini juga terdiri dari beberapa maksim yang mengatur suatu percakapan antarpeserta tutur. Maksim-maksim PK mengatur dimensi percakapan yang bersifat informatif sedangkan maksim-maksim PS mengatur dimensi percakapan yang bersifat sosial. Maksim-maksim PS, yang dikemukakan oleh Leech (1983) akan dipaparkan lebih lanjut pada pembahasan model teori kesantunan dalam Bab II laporan penelitian ini.

c. Prinsip Ironi

Prinsip ironi (PI) merupakan suatu prinsip urutan kedua (*second order principle*) yang bekerja atau dibangun setelah prinsip kesantuan (PS) Leech (983). Artinya, PI merupakan prinsip retorika yang mendampingi PK dan PS, yang berada pada urutan pertama. Adapun isi dari PI secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut:

'*If you must cause offence, at least do so in a way which does not overtly conflict with the Politeness Principle (PP), but allow the hearer to arrive or at the offensive point of your remark indirectly, by way of implicature.*'Jika anda terpaksa menyinggung perasaan mitra tutur, setidaknya Anda dapat melakukannya dengan cara tidak melanggar prinsip kesantunan secara terang-benderang, namun biarkan mitra tutur

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Anda secara tak langsung menangkap maksud tuturan Anda yang menyinggung tersebut melalui suatu implikatur' (Leech, 1993:125).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa PI memberikan suatu norma yang hendaknya diperhatikan oleh seorang penutur ketika ia harus membuat suatu tuturan yang menyinggung mitra tuturnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengkomunikasikannya dengan suatu implikatur sehingga *tindak menyinggung* yang pada dasarnya tidak santun itu tetap terdengar santun. Contoh penerapan PI dapat dilihat pada percakapan berikut.

[2] A: Motormu dipakai Novan lagi. (1)
B: Dikembalikan besok pagi juga tidak apa-apa. (2)

A dan B adalah teman sekantor yang sama-sama berteman dengan Novan, yang seringkali menggunakan motor B tanpa ijin. Ketika istirahat siang, B bermaksud pergi mencari makan siang. A yang mengetahui bahwa motor B masih digunakan oleh Novan, A memberitahu B dengan tuturan (1). Berdasarkan konteks tersebut, dapat dipahami bahwa apa yang dimaksudkan oleh B tidaklah sama dengan makna literal atau proposisi dalam tuturan (2). Secara literal, makna tuturan (2) adalah '*Novan tidak menjengkelkan walaupun memakai motor B tanpa ijin*' sedangkan maksud B yang sebenarnya adalah '*Novan sangat menjengkelkan karena memakai motor B seenaknya*'. Dalam hal ini terjadi suatu *ironi*, dimana maksud sebenarnya dari tuturan dimaksud berlawanan dengan makna literal dalam tuturan yang disampaikan.

Maksud B yang sesungguhnya itulah yang disebut *implikatur* yang tentu saja akan menyinggung perasaan Novan atau setidaknya akan terdengar tidak santun bagi A apabila dikatakan oleh B secara langsung dan sejujurnya. Alih-alih menyatakan maksud secara langsung, B sengaja memilih tuturan (2), yang makna (*sense*)-nya berbeda dengan daya (*force*) yang dikandungnya demi bersikap santun pada A dan sekaligus pada Novan. Dengan demikian, B memilih melanggar maksim kualitas dalam PK, yakni tidak mengatakan yang benar. Tentu saja implikatur yang dikomunikasikan oleh B melalui tuturan (2) itu pada dasarnya tetap menyinggung atau bernilai *tak santun* bagi Novan namun *maksud yang menyinggung* itu setidaknya disampaikan dengan cara melanggar PS secara tidak mencolok.

Ilustrasi dalam percakan [2] menunjukkan bahwa PI bersama-sama dengan PS dibutuhkan untuk menjelaskan hubungan antara makna (*sense*) dan daya (*force*), yang tidak dapat dijelaskan secara memuaskan oleh PK yang memang konstruksinya

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

didasarkan pada sudut pandang logika tradisional. Dengan perkataan lain, PI dan PS secara memadai dapat digunakan untuk menjelaskan adanya perilaku berbahasa yang ditunjukkan oleh manusia yang sering menggunakan cara yang tidak langsung terkait apa yang sesungguhnya ia maksudkan. Di samping itu, PI dan PS merupakan penjelasan mengapa sering pula terjadi ketidaktaatan terhadap maksim-maksim PK dalam penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Dalam kaitan inilah Leech (1993) menggarisbawahi bahwa PI dan PS memiliki kedudukan yang amat penting dalam retorika interpersonal dan dikatakan sebagai penyelamat PK dari kesulitan yang serius.

2. Konteks

Munculnya konsep konteks dalam Linguistik sesungguhnya merupakan pendobrak kemapanan aliran linguistik struktural (*'paradigm of grammar'*). Selama bertahun-tahun kajian bahasa didominasi oleh pandangan bahwa aspek *form* dalam suatu bahasa merupakan satu-satunya data yang paling *feasible* untuk dikaji. Akibatnya, kajian tentang makna kurang mendapatkan tempat sampai munculnya kesadaran bahwa banyak kasus-kasus kebahasaan yang tidak dapat diselesaikan tanpa menghadirkan unsur makna yang sangat bergantung pada *konteks*, dalam kajian bahasa.

Dalam kajian pragmatik konteks merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka melakukan suatu interpretasi terhadap makna suatu tuturan. Konsep konteks sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh Malinowski pada tahun 1923, yang meliputi konteks situasi dan konteks budaya. Konteks situasi itulah yang banyak digunakan oleh para ahli bahasa, diantaranya oleh Hymes (1964) yang mengaitkan konteks situasi tersebut dengan situasi tutur.

Sementara itu, Halliday dan Hassan (1976) memberikan penjelasan bahwa konteks dapat dirinci menjadi tiga dimensi, yakni: bidang (*field*), cara (*mode*), dan tenor (*tenor*). *Bidang* merupakan keseluruhan peristiwa dimana suatu teks memiliki suatu fungsi bersama-sama dengan kegiatan penutur atau penulis yang memiliki tujuan tertentu. Konsep *bidang* juga mencakupi pokok bahasan atau *subject-matter*. *Cara* adalah fungsi dari teks dalam peristiwa tersebut yang meliputi saluran penggunaan bahasa (lisan–tulisan), *spontaneous* atau *well-prepared*, dan *genre* atau

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

tipe teks (naratif, persuasif, didaktis, fatis, dsb. *Tenor* terkait dengan tipe interaksi peran, serangkaian hubungan sosial yang sesuai antara peserta tutur baik secara permanen atau sementara. Halliday dan Hassan (1976:23) menambahkan konsep *register*, yakni seperangkat makna, konfigurasi pola-pola semantik yang khas dan bersama-sama dengan kata dan tata bahasa yang digunakan oleh penutur / pembaca untuk mewujudkan suatu makna tertentu.

Ada pula Van Dijk (1977), yang membahas konteks dalam kaitannya dengan situasi interaksi tuturan dan konteks sebagai suatu struktur yang mengandung properti konteks tertentu. Properti pertama adalah bahwa konteks bersifat dinamis. Ia bukan sekedar keadaan dunia *(world-state)* yang mungkin terjadi melainkan berupa serangkaian keadaan dunia yang selalu berubah. Jadi konteks adalah serangkaian peristiwa (*a course of events*) yang terdiri atas situasi awal, situasi pertengahan, dan situasi akhir. Konteks yang mungkin terjadi (*possible context)* meliputi peristiwa, kenyataan, atau konteks aktual (*actual context*). Konteks aktual mengacu pada suatu periode waktu dan tempat terjadinya kegiatan bersama antara penutur dan petutur, yang memenuhi persyaratan *di sini (here*), dan *sekarang (now)* secara logis, fisik, dan kognitif. Properti konteks berikutnya terkait relasi dan persepsi yang ada di antara penutur dan petutur. Relasi mengacu pada penutur dan petutur yang masing-masing berfungsi sebagai agen dan pasien potensial, yang selanjutnya menjadi peserta tutur aktual dalam suatu ujaran. Partisipan aktual ini muncul dari sekelompok orang yang memiliki *property* karakateristik tertentu, misalnya kegiatan tertentu dalam konteks aktual. Dengan munculnya peserta tutur aktual maka akan terjadi dua fungsi penting, yakni (i) fungsi bertutur dan (ii) fungsi menyimak. Kedua fungsi ini menjelaskan suatu kenyataan yang ada dalam konteks peserta tutur yang sedang menghasilkan tuturan dan peserta tutur yang menyimak atau menginterpretasi tuturan. Nilai dan fungsi tersebut berbeda dalam setiap kenyataan konteks serta dalam sekelompok peserta tutur. Pada dasarnya struktur konteks tidak hanya terdiri atas *property* konteks tetapi juga perangkat-perangkat seperti pengetahuan, kepercayaan, keinginan, dan kemauan yang relevan dan aktual serta perangkat konvensi komunikatif dari masyarakat tutur tertentu (Van Dijk, 1977).

Sementara itu, Leech (1983) menjelaskan konsep konteks sebagai pengetahuan latar apa saja yang diasumsikan sebagai pengetahuan bersama antara penutur dan

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

petutur yang membantu proses interpretasi yang dilakukan oleh petutur terhadap maksud penutur yang sebenarnya dalam suatu ujaran (1983:13). Jadi konteks di sini dipahami sebagai salah satu aspek situasi ujaran, disamping aspek lain seperti penutur/petutur, tujuan, tindak ilokusioner, ujaran yang merupakan hasil tindak verbal, dan waktu dan tempat terjadinya ujaran tersebut. Sejalan dengan Van Dijk (1977), Yule (1998) mengemukakan bahwa konteks merupakan konsep yang dinamis, bukan statis. Ia dipahami sebagai 'lingkungan yang selalu berubah yang memungkinkan peserta tutur berinteraksi dan yang membantu mereka memahami ungkapan-ungkapan kebahasaan yang mereka gunakan dalam suatu proses komunikasi'.

Definisi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Cutting (2002), yang mengemukakan bahwa konteks merupakan 'dunia fisik dan sosial serta asumsi-asumsi pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan petutur. Selanjutnya secara rinci konteks dikategorikan menjadi konteks situasi, konteks pengetahuan latar, dan konteks *co-textual*. Konteks situasi adalah keadaan fisik yang muncul bersamaan dengan terjadinya suatu interaksi ketika percakapan berlangsung (*at the moment of speaking)*. Konteks pengetahuan latar (*background knowledge context*) dirincikan lagi menjadi (a) pengetahuan umum budaya (*cultural general knowledge*) dan (b) pengetahuan interpersonal (*interpersonal knowledge)*. Yang pertama mengacu pada pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada dalam kehidupan secara umum yang dimiliki dan disimpan dalam alam pikiran anggota suatu kelompok masyarakat. Sementara itu, pengetahuan interpersonal (*Interpersonal knowledge)* adalah pengetahuan yang diperoleh melalui interaksi verbal terdahulu atau kegiatan dan pengalaman bersama yang telah ditempuh para peserta tutur, termasuk hal-hal yang bersifat khusus dan pribadi yang melekat pada diri mereka masing-masing. Kategori konteks yang terakhir adalah *co-textual*, yakni konteks yang ada pada teks itu sendiri yang lazim disebut konteks verbal.

Dari berbagai definisi konteks di atas, peneliti berpijak pada konsep konteks yang dikemukakan oleh Gumperz dan Hymes (1972) yang merinci konteks ke dalam beberapa komponen tutur yang dikenal dengan akronim SPEAKING. S singkatan dari *setting*, yang mengacu baik pada tempat dan waktu terjadinya peristiwa tutur dan pada hubungan peserta tutur secara fisik termasuk postur dan *gesture* serta ekspresi raut muka. P mengacu pada peserta tutur (*participants*), yakni penutur atau penulis yang

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

membuat tuturan dan petutur atau pembaca yang menginterpretasi tuturan tersebut. E adalah singkatan dari *end*, yang merupakan tujuan yang mencakup maksud dan efek (*intent and effect*) yang diinginkan penutur atas terjadinya peristiwa tutur. A adalah *acts*. K adalah *key*, yang terkait dengan evaluasi terhadap tuturan, misalnya apakah suatu ceramah dianggap menarik atau membosankan. I adalah *instrument*, yang mengacu pada saluran (*channel*) tuturan yakni tulis atau lisan dan *code* (bahasa, dialek, ragam) yang digunakan peserta tutur. N adalah singkatan dari *norm*, yang terkait dengan norma interaksi yang dianut oleh peserta tutur. Dan G merupakan singkatan dari *genre* atau *message-form*, yakni tipe teks yang dihasilkan oleh penutur seperti obrolan, debat, khutbah, dongeng, puisi, surat cinta, dan sejenisnya.

Poedjosoedarmo (1985) mengembangkan dan mengadaptasi komponen tutur Gumperz dan Hymes tersebut ke dalam akronim bahasa Indonesia sebagai *memoteknik*, yaitu O,OE MAU BICARA. Akronim tersebut dapat dirinci sebagai beikut: O yang pertama adalah 'orang pertama' atau penutur. Bentuk suatu tuturan sangat ditentukan oleh kepribadian dan latar belakang penutur yang terkait watak, jenis kelamin, kelompok etnis, asal daerah, status sosial, umur, profesi, dan aliran keyakinan atau agamanya. O yang kedua singkatan dari 'orang kedua' atau petutur, terutama asumsi Pn kepada Pt ketika hendak bicara. Aspek-aspek terkait petutur yang diperhitungkan oleh penutur ketika menuturkan ujaran adalah tingkat keakraban dan kelas sosial petutur.

Sementara itu, E adalah 'warna emosi', yang mengacu pada suasana emosi Pn ketika hendak bertutur, apakah suasana hatinya sedang gugup, cemas, atau senang. Suasana hati tersebut akan menentukan bentuk tuturannya. Selanjutnya, M singkatan dari 'maksud', yakni niat atau kehendak Pn ketika bertutur. Pn yang hendak meminjam uang, misalnya, akan membuat tuturan yang ramah dan berbelit-belit kepada Pt. A yang pertama singkatan dari 'adanya' orang ketiga atau benda-benda di sekitar adegan pertuturan. Misalnya, rasa sungkan terhadap orang ketiga membuat Pn bertutur tidak lengkap dan cenderung berbisik pada Pt. Dan U singkatan dari 'urutan tutur', maksudnya Pn sebagai orang pertama yang mengawali pertuturan akan lebih bebas dalam menentukan bentuk tuturannya daripada Pt. Misalnya, Pn yang memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam bertutur sedikit kemungkinannya dijawab oleh Pt dalam bahasa lain.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Akhirnya, rangkaian akronim BICARA secara berturut-turut merupakan singkatan dari Bab, Instrumen atau sarana tutur, Citarasa tutur, Adegan tutur, Register, dan Aturan atau norma kebahasaan lain. Bab adalah pokok pembicaraan, yang dapat mempengaruhi warna suasana pertuturan. Seorang Pn yang sedang berdiskusi masalah hukum dengan Pn akan menggunakan bahasa Indonesia ragam formal. Instrumen mengacu pada alat yang digunakan oleh Pn dalam bertutur. Pn yang berbicara melaui HP akan berbeda dengan ketika ia berbicara melaui atau radio antar penduduk (RAP). Citarasa tutur mengacu pada citarasa bahasa yang menentukan bentuk ragam tutur yang digunakan Pn, apakah menggunakan bahasa yang puitis, indah, atau santai tergantung pada situasi dan suasana pertuturan. Adegan tutur mengacu pada faktor-faktor terkait tempat, waktu dan peristiwa tutur. Register mengacu pada bentuk wacana atau genre tertentu. Bentuk wacara memberi sambutan lazimnya tersusun atas salam, pembukaan, isi sambutan, dan penutup. Dan aturan atau norma mengacu pada aturan kebahasaan atau norma sosial, misalnya kejelasan bicara atau hal-hal yang patut atau tidak patut dikemukakan dalam pertuturan.

Konsep konteks dengan komponen tutur yang dikemukan Gumperz dan Hymes (1972) dan Poedjosoedarmo (1985) tersebut dipergunakan peneliti untuk menuntukan arah penelitian terutama terkait dengan proses pengumpulan data dan analisis data. Namun demikian, tidak semua komponen tutur tersebut dicakup sebagai dasar pijakan. Hanya komponen tutur yang sangat relevan dengan masalah kesantunan saja yang dimanfaatkan. Antara lain adalah komponen *participant* (peserta tutur) yang meliputi orang pertama terutama yang terkait aspek-aspek jenis status sosial, umur, dan profesinya dalam budaya MT serta orang kedua yang menyangkut aspek tingkat keakraban dan kelas sosialnya. Berikutnya adalah komponen bab pembicaraan, *scene* atau adegan tutur seperti tempat, waktu dan suasana pertuturan. Yang terakhir adalah aturan kebahasaan dan norma sosial yang terkait dengan budaya MT.

3. Implikatur

Menurut Mey (2001) , istilah implikatur berasal dari bahasa Latin *plicare* yang berarti ‘melipat’. Derivasinya dalam bahasa Inggris adalah kata kerja ‘*to imply’* yang aslinya bermakna ‘*to fold something into something else*’ (melipat sesuatu ke dalam sesuatu yang lainnya). Dari sinilah kemudian asal makna kata *implikatur*, yang

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

diasalkan dari kata *'implied'* yang berarti '*folded in*' (terlipat) dan harus dibuka lipatan tersebut (*unfolded*) jika kita ingin mengetahui artinya. Jadi implikatur percakapan adalah sesuatu yang tersirat di dalam suatu percakapan, yaitu sesuatu yang dibiarkan tersembunyi di dalam penggunaan bahasa secara nyata. Implikatur tidak dapat dikaji melalui kaidah tata bahasa maupun semantik sehingga perlu didekati dengan cara lain yang lebih tepat, yakni melalui Pragmatik.

Secara pragmatik, Mey (2001) mendefinisikan implikatur sebagai '*an additional conveyed meaning*, yakni makna tambahan yang lebih dari yang dikomunikasikan. Menurutnya, penuturlah yang memilih berkomunikasi dengan implikatur dan tugas petutur adalah mengasumsikan bahwa penutur bekerja sama dalam percakapan yang mereka lakukan sehingga ia dapat mengenali makna tambahan yang dimaksudkan dalam percakapan dengan menarik kesimpulan (*inference*).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti secara khusus membahas implikatur dalam pragmatik, khususnya implikatur percakapan. Ciri paling menonjol terkait implikatur percakapan adalah bahwa petutur dalam menarik makna implikatur dari suatu percakapan itu didasarkan pada asumsi bahwa terdapat interaksi yang kooperatif yang dilakukan Pn. Ciri lainnya adalah bahwa implikatur percakapan itu '*deniable'*. Penutur yang memilih menyampaikan informasi melalui implikatur selalu dapat menolak maksud atau makna yang ia sampaikan karena makna tersebut memang tidak benar-benar dikatakan.

Implikatur percakapan merupakan makna tambahan yang ditarik dari pengetahuan khusus tentang konteks tertentu, di mana inferensi lokal dapat diperoleh. Implikatur percakapan khusus inilah yang banyak dikaji di dalam pragmatik atau biasanya cukup disebut dengan *implikatur* saja.

Dalam hal ini istilah implikatur dikaitkan dengan teori Grice tentang Prinsip Kerjasama (PK) dan maksim-maksimnya. Menurut Grice komunikasi dapat berjalan secara efektif jika para peserta tutur bekerjasama satu sama lain. Artinya, peserta komunikasi perlu mematuhui prinsip kerjasama (*Cooperative Principle*), yang dijabarkan menjadi empat, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan, dan maksim cara.

Jika keempat maksim itu dipatuhi maka penyampaian informasi akan menjadi efektif dan efisien. Secara ringkas seorang penutur dikatakan memenuhi maksim-

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

maksim Grice apabila ia memberikan informasi tidak lebih atau tidak kurang dari yang dibutuhkan, informasinya benar atau tidak keliru, informasi itu relevan dengan pokok pembicaraan, dan penyampaiannya baik dan mudah dipahami, jelas, sistematis, langsung dan tidak bertele-tele.

Dalam bertutur, seseorang dapat memilih mengkomunikasikan maksudnya melalui eksplikatur atau implikatur. Pengguna bahasa yang berkomunikasi melalui eksplikatur, yakni makna proporsional ujaran yang disampaikan secara eksplisit dan dapat dipahami dengan relatif mudah oleh mitra tuturnya, biasanya bertujuan untuk menyampaikan informasi secara efektif. Secara teoretis hal ini dilakukan dengan mematuhi Prinsip Kerjasama Grice (1975). Sebagai contoh perhatikan percakapan berikut:

Ibu: Sudah sarapan, Ton?
Tono: Sudah, Bu?

Jika Tono mematuhi maksim kualitas, yakni informasi yang ia sampaikan benar adanya atau dia tidak sedang ingin berbohong, maka dalam hal ini ia menggunakan eksplikatur dalam menjawab pertanyaan ibunya tersebut. Jadi dalam hal ini tidak ada kesenjangan antara makna proposisi yang ia sampaikan dan yang ia maksudkan.

Namun demikian penutur tidak selalu mematuhi maksim-maksim Grice tersebut di dalam praktik penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran terhadap maksim Grice inilah yang menimbulkan suatu implikatur percakapan, yakni makna atau pesan tambahan yang menjadi bagian dari komunikasi yang tidak diujarkan. Mey (2001) mencontohkan dalam percakapan berikut:

Charlene: *I hope you brought the bread and the cheese*.
Dexter: *Ah, I brought the bread.*

Setelah mendengar jawaban Dexter, Charlene harus megasumsikan bahwa Dexter masih mematuhi prinsip kerjasama, hanya saja kurang mengindahkan maksim kuantitas. Ia hanya menyebutkan *roti* saja dan tidak menyatakan apa-apa tentang *keju*. Seandainya ia membawa keju pasti sudah ia katakan. Jadi di sini ia berharap bahwa Charlene dapat menangkap maksudnya '*yakni yang tidak dikatakan berarti tidak dibawa*'. Dalam hal ini Dexter memilih mengungkapkan maksudnya melalui *implikatur*.

Contoh lain tentang implikatur percakapan diberikan oleh Yule (1998), ditemukan dalam percakapan berikut ini.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

A: *What time is it?*
B: *The bus just went by*.

Jawaban B di atas secara gramatikal bukanlah jawaban yang tepat atau relevan dengan pertanyaan A. Tetapi tuturan tersebut akan segera berterima jika dihubungkan dengan konteks berikut: 'A selalu bepergian menggunakan jasa bus umum satu-satunya yang lewat depan rumahnya setiap pukul 7.45 pagi. B adalah adik A yang sedang berada di ruang tamu dan mengetahui rutinitas B pada pagi hari'. Dengan konteks tersebut maka tidak ada masalah komunikasi dalam respon B atas pertanyaan A. Dalam hal ini, yang ingin dikomunikasikan B adalah 'Kamu sudah ketinggalan bus yang biasanya kamu tumpangi'. Jawaban inilah yang sebenarnya diharapkan oleh A karena pertanyaannya ditujukan untuk mengetahui apakah bus tumpangannya telah lewat atau belum, bukan semata-mata menanyakan waktu. Inilah yang disebut dengan implikatur percakapan oleh Yule.

Sejauh ini ada dua teori utama terkait implikatur dalam perkembangan pragmatik, yakni teori Grice (1975) dan teori Sperber dan Wilson (1986). Namun teori yang kedua itulah yang tampaknya lebih kuat dalam hal kepadaan penjelasan terhadap bagaimana suatu implikatur dapat diinferensikan secara tepat oleh petutur dalam suatu peristiwa pertuturan. Di dalam memahami sebuah implikatur, seorang petutur harus menebak mana implikatur yang paling kuat yang dimaksudkan oleh penutur diantara serangkaian implikatur yang muncul.

Dengan perspektif teori Grice, serangkaian implikatur dapat muncul dari suatu ujaran sehingga tidak dapat dibedakan mana implikatur yang lemah dan mana yang kuat. Cruse (2001:369) mengemukakan bahwa dalam teori Grice implikatur dapat ditarik dengan mengkombinasikan eksplikatur dan konteks, dengan asumsi bahwa konteks itu tidak bermasalah. Dengan demikian asumsi ini cukup lemah sebab tidak ada penjelasan bagaimana seorang petutur memilih fitur-fitur yang sesuai dari konteks dalam rangka melakukan inferensi terhadap implikatur yang kemungkinan besar dimaksudkan oleh penutur. Dengan perkataan lain, seperti yang diakui Grice sendiri bahwa pedoman atau mekanisme proses penarikan implikatur oleh seorang petutur bersifat tidak pasti (Thomas, 1995:88).

Berbeda dengan teori Sperber dan Wilson, implikatur dapat dicari dan diinferensikan berdasarkan pedoman relevansi alih-alih pelanggaran terhadap maksim relevansi seperti yang dikemukakan Grice. Kedua pakar tersebut menggarisbawahi

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

bahwa faktor utama yang memungkinkan komunikasi berhasil, termasuk penarikan sebuah implikatur dalam suatu pertuturan adalah karena adanya relevansi optimal. Terdapat dua kondisi yang memungkinkan suatu ujaran memiliki relevansi optimal: (1) jika ujaran itu memungkinkan petutur menemukan atau memahami maksud ujaran penutur dengan cepat dan mudah atau tanpa usaha kognitif yang berlebihan dan (2) jika petutur merasa bahwa makna atau maksud penutur itu berharga atau tidak sia-sia diproses atau dibiayai dengan suatu usaha guna memperoleh manfaat dari usaha tersebut. Manfaat dalam hal ini mengacu pada terjadinya modifikasi pengetahuan pada diri petutur dalam bentuk efek kontekstual yang positif disebabkan (1) adanya penambahan informasi baru; (2) penguatan informasi lama; (3) pelemahan informasi lama; atau (4) pembatalan informasi lama (Cruse, 2001). Jadi, makin banyak efek kontekstual, makin besar pula derajat relevansi informasi yang dikandung suatu ujaran. Sebaliknya, makin sedikit usaha yang dibutuhkan untuk memproses informasi masuk, makin besar pula relevansinya.

Terkait dengan implikatur, Sperber dan Wilson menjelaskan bahwa petutur dapat menarik implikatur dengan tepat karena ia melalui tiga tahap inferensi. Tahap pertama adalah menarik eksplikatur pada tataran ujaran. Di sini, petutur mencoba memahami makna proposisi ujaran. Berikutnya, ia menarik eksplikatur pada tataran yang lebih tinggi, yaitu dengan melacak informasi, misalnya tentang sikap penutur, di dalam gudang ingatan *(memory store)* yang ia miliki. Inilah yang disebut mengidentifikasi *higher-order explicature*. Informasi yang lain juga dapat dilacak di *schemata* si petutur tentang watak, tabiat, atau hal-hal yang relevan yang ia alami dengan penutur. Dari hasil pelacakan informasi yang relevan dengan eksplikatur tersebut, petutur mendapatkan sederet implikatur yang muncul. Akhirnya, ia mencari makna yang paling banyak mengandungi efek kontekstual dan paling cepat dipahami dengan mengeluarkan usaha yang paling sedikit. Pada tahap inilah si petutur telah sampai pada implikatur yang paling kuat, yang sangat mungkin dimaksudkan oleh penutur.

4. Tindak Tutur

Tindak tutur (*speech act)* adalah '*the basic or minimal units of linguistic communication'*, yaitu unit-unit dasar atau terkecil dari komunikasi (Searle, 1969:16). Jadi dalam pandangan Searle, unit terkecil dari komunikasi bukanlah kata

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

atau kalimat seperti dalam pandangan penganut aliran linguistik formal, yang secara tradisional memandang bahwa kalimat selalu mengandung suatu proposisi yang bernilai *benar* atau *salah*. Dalam pragmatik pernyataan-pernyataan tidak hanya bersifat '*constative'* tetapi juga *performative,* dalam pengertian bahwa penutur tidak sekedar mengatakan sesuatu tetapi ia 'melakukan sesuatu' *(*Austin, 1962). Pada saat seseorang menuturkan 'Saya berjanji akan membelikan baju untukmu' atau 'Saya minta maaf atas kejadian tadi', maka ia tidak hanya mengucapkan serangkaian kata-kata saja tetapi pada dasarnya ia melakukan tindakan berjanji atau tindakan meminta maaf. Austin menyebut tuturan-tuturan tersebut sebagai tuturan *performatif,* dan kata kerja-kata kerja seperti 'berjanji' atau 'meminta maaf' disebut kata kerja *performatif.*

Pemikiran Austin tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Searle (1969) yang memperjelas tiga aspek tindak tutur, yaitu *locutionary act, illocutionary act,* dan *perlocutionary act.* Menurut Searle, setiap orang yang berbicara dalam peristiwa komunikasi secara simultan melakukan tindakan-tindakan, yaitu (1) melafalkan kata-kata atau kalimat (*utterance act/ locutionary act*), (2) mengacu (*referring*) pada subjek dalam tuturan sekaligus menyatakan sesuatu terkait subjek (*predicating*) dalam kalimat/tuturan yang dilafalkan, yang selanjutnya disebut *propositional act,* (3) memaksudkan sesuatu seperti menyuruh, bertanya, meminta, dan sejenisnya yang dikandung oleh tuturan yang dilafalkan, yang disebut *illocutionary act* (Searle, 1969: 23-25).

Dengan demikian *locutionary act* adalah tindak melafalkan serangkaian kata dalam tuturan sedangkan *illocutionary act* dan *propositional act* secara khas terjadi apabila suatu tuturan diucapkan dalam konteks tertentu, kondisi tertentu, dan dengan kehendak (*intention*) tertentu. Dalam pada itu, *perlocutionary act* merupakan akibat yang timbul dari tindakan-tindakan (*locutionary act, illocutionary act* dan *propositional act*) pada diri petutur dalam hal tindakan, pemikiran, atau kepercayaannya sebagai reaksi tindak tutur yang dilakukan oleh Pn. Jika seorang Pn melakukan tindak tutur *menyuruh* maka Pt akan bereaksi dengan 'melakukan sesuatu'. Begitu pula, jika Pn *memperingatkan* Pt maka Pt dapat merasa 'takut', 'cemas' atau 'waspada'. Kata-kata yang dicetak miring adalah *illocutionary act* sedangkan yang bertanda petik adalah *percolutionary act*.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Selain mengembangkan pemikiran Austin tentang dimensi tindak tutur tersebut, Searle berupaya menyempurnakan klasifikasi tindak tutur yang dibuat Austin. Menurut Searle (1969), klasifikasi tindak tutur yang dibuat Austin tersebut mengalami tumpang tindih dalam kriteria (*overlapping criteria).* Austin dipandang mencampuradukkan antara *speech act* dan *speech act verbs* sehingga Searle perlu membuat klasifikasi tindak tutur tersendiri. Kritikan senada diberikan oleh Leech (1983: 176) yang mengemukakan bahwa klasifikasi tindak tutur Austin mengandung '*Illocutionary–Verb Fallacy'* (kesalahan verba ilokusi), yakni kesalahan tentang asumsi bahwa terdapat korespondensi satu-satu antara '*doing thing with words*' dan '*performative verb'*.

Walaupun berupaya membuat klasifikasi sendiri, kategori tindak tutur Searle secara substantif hampir sama dengan Austin, namun berbeda istilah saja (Mey: 2001). Misalnya, *tindak tutur representative* sama dengan *constative*, *directive* sama dengan *exercitive* dan *behabitive*, dan *declarative* sama dengan *performative* dalam istilah Austin. Sementara itu, kategori dan istilah *commissive* dipakai baik oleh Searle maupun Austin (Mey, 2001:122-123). Selengkapnya, klasifikasi tindak tutur menurut Searle adalah sebagai berikut:

a. *Declaration*

Tindak tutur ini mencakupi kata-kata atau ungkapan yang dapat merubah dunia atau *the state of affairs.* Adapun beberapa kata kerja yang terkait dengan tindak tutur ini adalah *bertaruh, mendeklarasikan, membaptis, mengundurkan diri, menyatakan berhenti melakukan sesuatu.*

b. *Representatitive*

Tindak tutur ini terkait dengan tindakan menyatakan apa yang dipercayai sebagai sesuatu yang benar oleh penutur. Adapun beberapa kata kerja yang terkait dengan tindak tutur ini adalah *mendeskripsikan, mengklaim, menduga, mendesak, meramalkan.*

c. *Commisive*

Tindak tutur ini terkait dengan kata-kata yang mengikat penutur untuk melakukan tindakan di masa yang akan datang. Adapun beberapa kata kerja yang terkait dengan tindak tutur ini adalah *berjanji, menawarkan, mengancam, menolak, bersumpah,* dan *bersuka rela.*

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

d. *Directive*

Tindak tutur ini mencakupi tindakan di mana kata-kata yang digunakan bertujuan untuk membuat mitra tutur agar mengerjakan sesuatu. Adapun beberapa kata kerja yang terkait dengan tindak tutur ini adalah *memerintah, memohon, mengundang, melarang, menyarankan.*

e. *Expressive*

Tindak tutur ini berhubungan dengan tindakan di mana kata-kata yang digunakan menyatakan apa yang dirasakan oleh penutur. Beberapa kata kerja yang terkait dengan tindak tutur ini adalah *meminta maaf, memuji, memberi selamat, mengiba, menyesal.*

Di samping Searle, Kleidler (1998), yang mempunyai konsep yang cukup jelas terhadap perbedaan-perbedaan tiap-tiap kategori tindak tutur yang ada. Walaupun terdapat perbedaan istilah dan jumlah kategori tindak tutur dalam klasifikasi yang dibuatnya, secara substantif tidak jauh berbeda dengan Searle. Kategori-kategori tindak tutur Kreidler dapat disarikan sebagai berikut:

a. *Assertive*

Tindak tutur ini bertujuan memberikan informasi atau mengemukakan fakta, data, apa yang sedang eksis atau apa yang telah eksis, dan apa yang sedang atau yang telah terjadi. Pernyataan *assertive* bernilai benar atau salah sehingga dapat diverifikasi atau difalsifikasi oleh petutur atau orang lain. Kondisi kelayakan tindak tutur ini antara lain adalah laporan harus layak *(feasible)*, penutur terikat pada kebenaran laporan yang ia buat, dan petutur menganggap laporan penutur benar. Berbagai kata kerja yang terkait dengan tindak tutur ini memiliki ciri antara lain: (1) fokus pada informasi seperti *mengumumkan, mendeklarasikan, mengungkapkan, menjelaskan, mengemukakan, mengindikasikan, menyebutkan, menghubungkan, melaporkan, memproklamirkan;* (2) fokus pada kebenaran ujaran seperti *menguatkan, menjamin, memelihara, bersumpah, bertaruh menguji, mengklaim, meyakinkan, mensertifikasi;* (3) fokus pada komitmen penutur atau keterlibatan dalam apa yang dilaporkan seperti *memprotes, menolak, mempercayai*, dsb; (4) fokus pada cara berkomunikasi seperti *menekankan, mengisyaratkan, mengimplikasikan, intimate.* (5) fokus pada sifat pesan seperti *mendiktekan, menarasikan, berkhutbah;* (6) fokus pada aspek seperti *memprediksi, mengingat.*

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

b. *Performative*

Tindak tutur ini memiliki ciri utama, yaitu membawa perubahan kondisi dunia (*the state of affairs*). Ujaran yang mengandung tindak tutur ini biasanya berupa kalimat yang memiliki subyek orang pertama *saya* atau *kita* dan menggunakan waktu kata kerja '*present tense*'. Kondisi kelayakan tindak tutur ini antara lain adalah *penutur memiliki kewenangan untuk membuat ujaran performatif, waktu, tempat dan lingkungan sekitar harus sesuai, kewenangan penutur dan kelayakan peristiwa diakui oleh petutur.* Contoh kata kerjanya adalah *membaptis, menawar dalam lelang, melakukan taruhan, memecat, menikahkan, mendeklarasikan, meresmikan, menominasikan, melakukan penangkapan.*

c. *Verdictive*

Tindak tutur ini dilakukan penutur untuk membuat pengukuran (*assessment*) atau penilaian (*judgement*) terhadap tindakan petutur atau orang lain. Kondisi kelayakannya meliputi (1) ada suatu kemungkinan terjadinya tindakan, (2) kemampuan petutur untuk melakukan tindakan tersebut ada, (3) ketulusan penutur dalam mengujarkan tindakan verdiktif, dan (4) petutur percaya bahwa penutur bersikap tulus. Kata kerja yang terkait dengan tindak tutur ini dibedakan menjadi (a) tindakan yang dipandang positif, yaitu *memuji, memberi selamat, menghargai;* (b) tindakan yang dipandang negatif, yakni: *menuduh, menyangka, mengkritik, menyalahkan, mencela, mencaci;* dan tindakan yang dipandang menguntungkan penutur seperti *berterima kasih, berhutang budi.* Karena merupakan penilaian penutur terhadap tindakan petutur yang bersifat *retrospective,* kata kerja di atas lazimnnya secara eksplisit digunakan di dalam pola kalimat: '*Saya* _____ *anda karena / untuk* _____ '.

d. *Direktif*

Tindak tutur ini merupakan ujaran yang membuat petutur melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang bersifat 'akan datang' *(prospective)*. Kondisi kelayakannya meliputi (1) tindakan memiliki kelayakan untuk dilakukan, (2) petutur mampu untuk melakukan tindakan tersebut, (3) untuk perintah , petutur mengakui kewenangan penutur, (4) untuk pemohonan, penutur memiliki 'harapan terkabulnya permohonan tsb.' Dan (5) untuk saran, penutur harus melakukan penilaian. Ujaran berupa kalimat yang mengandung kata ganti orang kedua kamu / kau / and sebagai

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

pelaku tindakan. Tindak tutur ini mencakup tiga jenis tindakan yaitu: perintah, seperti *memerintah, mewajibkan, melarang, menuntut;* permohonan seperti *meminta, tertarik untuk, memohon, berharap* dan saran seperti *menyarankan, sebaiknya, menasehati.*

e. *Ekspresif*

Tindak tutur ini merupakan ujaran penutur yang bersumber dari tindakan penutur sendiri. Kondisi kelayakannya meliputi (1) kelayakan tindakan, (2) kemampuan penutur untuk melakukan tindakan tersebut, (3) ketukusan penutur dalam mengujarkan tindakan ekspresif, dan (4) petutur percaya bahwa penutur berbicara tulus dan petutur mempercayainya. Tindak tutur ini berhubungan dengan kata kerja seperti *mengakui, mengaku (bersalah / berdosa), meminta maaf, menyangkal, memyombongkan / membanggakan diri.* Karena merupakan pengakuan penutur terhadap tindakannya sendiri yang bersifat telah lalu *(retrospective),* kata kerja di atas biasanya secara eksplisit digunakan di dalam pola *'Saya _____ anda karena saya telah _____'.*

f. *Komisif*

Tindak tutur ini merupakan ujaran yang mengikat penutur untuk melakukan tindakan yang terjadi di masa mendatang *(prospective)* seperti yang dinyatakannya. Kondisi kelayakannya meliputi (1) penutur mampu melakukan tindakan sesuai janjinya dan bermaksud untuk menunaikannya, dan (2) petutur memiliki kepercayaan terhadap kemampuan dan kesungguhan penutur dalam melakukan tindakan. Contoh kata kerja yang termasuk dalam tindak tutur ini adalah *menjanjikan, menyepakati, menawarkan, menolak, bersumpah, bertanya.*

g. *Fatis*

Tindak tutur ini terkandung dalam tuturan yang ditujukan untuk memelihara hubungan yang simpatik dan akrab di antara anggota masyarakat yang berlatar budaya sama. Kondisi kelayakan meliputi: (1) penutur dan petutur mengetahui atau menjalankan kebiasaan-kebisaan sosial yang sama dan (2) penutur dan petutur mengenal betul bentuk-bentuk ungkapan fatis yang telah lazim digunakan dalam situasi sosial tertentu untuk menjaga keharmonisan sosial di dalam budaya masyarakat mereka. Ujaran-ujaran yang mengandung tindak tutur ini meliputi antara lain: ucapan salam perjumpaan dan perpisahan, ungkapan-ungkapan santun seperti

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

‘’*thank you, ‘you’re welcome’,* perbincangan informal yang santun (*polite chit-chat*) tentang cuaca, kesehatan seseorang atau hal-hal lain yang lazim dan diharapkan di dalam suatu masyarakat dan frase-frase tipikal yang digunakan untuk memberikan selamat, dsb.

Disamping dibedakan berdasarkan jenis ilokusinya seperti di atas, tindak tutur juga dibedakan berdasarkan derajat kelangsungan ilokusinya. Suatu tindak tutur dapat dinyatakan secara langsung dan tidak langsung. Hampir semua pakar menerima pentingnya pembedaan antara tindak tutur langsung dan tak langsung. Namun upaya mendefinisikan nosi ketaklangsungan secara akurat tampaknya sulit dilakukan.

Secara ringkas, tuturan yang mengandung tindak tutur langsung memiliki ciri yang tidak taksa (*unambiguous*). Artinya, tuturan itu hanya mengandung satu interpretasi atau maksud yang jelas, sebagaimana dinyatakan Brown dan Levinson (1978:69), yakni ‘*one unambiguously attributable intention with which witnesses would concur* (‘satu maksud yang bersifat tidak taksa dengan suatu kesaksian yang sesuai’). Misalnya, ‘Saya meminta anda menandatangai surat ini’ kalimat ini mengandung satu interpretasi maksud yang sudah jelas, yakni ‘Pn meminta Pt untuk bertandatangan’, sehingga ia merupakan tindak tutur langsung. Oleh karena tindak tutur langsung memberikan satu maksud yang jelas, seorang Pt tidak memerlukan proses interpretasi yang panjang dan dapat langsung menangkap apa yang dimaksudkan Pn.

Sebaliknya, tuturan yang mengandung tindak tutur taklangsung selalu bersifat taksa. Blum-Kulka (1989:45) menyatakan bahwa *indirectness is seen as comprised of conventional and nonconventional indirectness; Both types involve pragmatic ambiguity* (‘ketaklangsungan terdiri dari ketaklangsungan konvensional dan nonkonvensional; Kedua tipe tersebut berhubungan dengan ketaksaan pragmatik’). Pernyataan senada datang dari Brown & Levinson (1978:124) yang mendefinisikan ketaklangsungan sebagai ‘*any communicative behavior, verbal or nonverbal, that conveys something more than or different from what it literally means* (‘perilaku komunikatif, verbal atau nonverbal, yang menyampaikan sesuatu (maksud) yang lebih atau berbeda dengan makna literalnya’). Suatu tuturan misalnya, ‘Udara di sini panas sekali’ dapat mengandung maksud lebih dari satu (taksa). Pn dapat bermaksud

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

mengeluh, memberitahu, atau meminta. Dalam konteks, Pn berada di ruang tertutup yang ACnya tidak aktif, maka maksudnya adalah Pn meminta ACnya diaktifkan. ini' kalimat ini mengandung satu interpretasi maksud yang sudah jelas, yakni 'Pn meminta Pt untuk bertandatangan', sehingga ia merupakan tindak tutur langsung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa langsung atau tidaknya suatu ilokusi dapat dilacak dari ada tidaknya ketaksaaan dalam tuturan tersebut.

Pembedaan antara tindak tutur langsung dan tak langsung dapat dilihat dari aspek kesesuaian antara modus kalimat/tuturan dan fungsi atau ilokusi yang terkandung dalam kalimat atau tuturan tersebut (Wijana, 1996). Apabila suatu tuturan yang mengandung ilokusi 'memerintah' bermodus kalimat perintah, maka ia disebut tindak tutur langsung. Misalnya, 'Bu, ambilkan tas saya' merupakan tindak tutur langsung karena tindak ilokusinya sama dengan modus kalimatnya, yaitu tindak memerintah disampaikan dengan kalimat perintah. Sebaliknya, tindak tutur tak langsung ditengarai sebagai tuturan yang mengandung ilokusi/fungsi yang tidak sama dengan modus kalimatnya. Tindak ilokusi 'memerintah' yang disampaikan dengan tuturan yang bermodus kalimat tanya, misalnya, merupakan tindak tutur tak langsung. Tuturan seperti 'Dapatkah anda mengambilkan tas itu?' merupakan tindak tutur tak langsung karena ia mengandung ilokusi memerintah sedangkan modus kalimatnya adalah kalimat tanya.

Untuk kepentingan analisis data dalam penelitian ini, peneliti mengikuti pemikiran Blum-Kulka (1989) yang membedakan tindak tutur langsung dan tak langsung. Berdasarkan skala ketaklangsungan, suatu tuturan impositif, khususnya dalam tindak meminta, dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yakni (1) bentuk langsung, (2) bentuk tak langsung konvensional, dan (3) bentuk tak langsung non-konvensional. Selanjutnya, bentuk tuturan langsung dibedakan menjadi lima kategori, yaitu:

1) imperatif: tuturan yang daya ilokusinya dapat secara langsung dilacak melalui aspek gramatikalnya, misalnya: *'Pergilah sekarang!', 'Bersihkan kotoran itu!'*
2) performatif: tuturan yang daya ilokusinya disebutkan secara tersurat dalam tuturan tersebut, misalnya: '*Saya <u>minta</u> anda pulang sekarang'*.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

3) performatif berpagar: tuturan yang daya ilouksinya diterangkan oleh ungkapan-ungkapan berpagar, misalnya: *Jika tak berkeberatan, saya mohon Anda pulang sekarang.*

4) pernyataan kewajiban: tuturan yang mewajibkan petutur melakukan suatu tindakan, misalnya: '*Anda harus pergi sekarang'.*

5) pernyataan keinginan: tuturan yang berisi keinginan penutur terhadap petutur untuk melakukan sesuatu, misalnya*: 'Saya sungguh berharap kamu pulang sekarang '.*

Sementara itu ketaklangsungan konvensional (tidak dalam bentuk isyarat) dapat dilakukan secara langsung karena petutur dibimbing oleh peranti-perianti gramatikal dan semantik yang digunakan secara konvensional dalam ujaran. Permintaan tak langsung, misalnya: '*Can you pass me the salt, please?*', tidak memerlukan proses dan cara interpretasi yang rumit dan panjang seperti yang terjadi pada proses interpretasi suatu isyarat. Melalui petunjuk gramatikal *Could / Can you…?* dan petunjuk semantik *please* petutur dapat segera memahami tindak meminta tersebut. Bentuk taklangsung konvensional mencakupi bentuk-bentuk berikut:

6) Saran: tuturan yang berisi suatu saran untuk melakukan suatu tindakan, misal: *'Sebaiknya kita pulang sekarang'.*

7) Pertanyaan kesiap-sediaan: tuturan yang berisi acuan terhadap kondisi petutur terkait dengan kemampuan dan kemauannya dalam melakukan sesuatu, misalnya: '*Bisakah / Maukah anda pulang sekarang?'.*

Yang terakhir adalah bentuk tak langsung non-konvensional, yang dapat dirinci menjadi:

8) isyarat kuat: tuturan yang berisi acuan sebagian terhadap obyek atau unsur yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan, misalnya: '*Anda telah meninggalkan dapur dalam keadaan kotor'*= Bersihkan dapurnya.

9) isyarat lemah: tuturan yang tidak memiliki acuan sama sekali tetapi dapat dipahami sebagai suatu tindak meminta melalui konteks, misalnya: '*Perut saya lapar'*= Ambilkan saya makanan.

5. Ilokusi Impositif

Sebagaimana disampaikan pada Bab I laporan penelitian ini, istilah *impositif* diberikan oleh Leech (1983) untuk membedakan sub-kategori tindak tutur direktif

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

yang memuat daya impositif dan yang tidak. Pembedaan itu secara jelas terlihat dalam tuturan-tuturan berikut:

(1) *'Can't you sit down?* ('Tidak dapatkah Anda duduk?')
(2) '*Won't you sit down?* ('Tidak maukah Anda duduk?')

Tuturan (1) merupakan tindak tutur direktif yang memiliki daya impositif. Tindak meminta yang dikandung tuturan tersebut disampaikan dengan tidak ramah sehingga memberikan efek tekanan psikologis bagai Pt. Sementara itu, tuturan (2) '*Won't you sit down?* ('Tidak maukah Anda duduk?') adalah sebuah tindak tutur direktif yang tidak menimbulkan daya impositif (tekanan) pada Pt. Dalam tuturan tersebut Pn memberi tawaran pada Pt untuk duduk, alih-alih berdiri. Karena sifatnya tawaran, maka tuturan tersebut tidak bersifat menekan Pt, bahkan memberikan kenyamanan atau keuntungan pada Pt. Dengan demikian, secara intrinsik ujaran (1) merupakan tindak tutur direktif yang bersifat impositif atau membebani sedangkan ujaran (2) merupakan direktif yang bersifat non-impositif.

Dalam membahas ilokusi direktif (dalam klasifikasi Searle, 1969), Leech juga mengemukakan bahwa istilah impositif perlu digunakan dalam pembahasan tindak tutur dalam rangka menghindari kekacauan antara istilah direktif yang dipakai untuk menamai ilokusi langsung (*direct illocution*) dan tak langsung (*indirect illocution*) dan istilah direktif sebagai nama suatu kategori tindak tutur. Dalam pembahasan tersebut, ilokusi direktif secara tersirat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ilokusi-ilokusi yang bersifat kompetitif seperti *memerintah, meminta, memohon, menuntut, dan menasehati,* dan ilokusi yang bersifat konvivial, seperti *mengundang.* Ilokusi direktif yang bersifat kompetitif inilah yang kemudian disebut ilokusi impositif (Leech, 1993: 164).

Di samping itu, Leech membuat klasifikasi tindak tutur berdasarkan hubungan fungsi-fungsi ilokusi dengan tujuan-tujuan sosial dalam rangka pemeliharaan perilaku yang santun dan terhormat. Atas dasar tersebut, Leech (1983) mengemukakan empat jenis ilokusi: (1) ilokusi kompetitif, yang memiliki tujuan ilokusi bersaing dengan tujuan sosial, seperti *memerintah, meminta, menuntut, memohon,* dsb.; (2) ilokusi konvivial, yang memiliki tujuan ilokusi sejalan dengan tujuan sosial, seperti *menawarkan, mengundang, menyapa, berterima kasih,*dsb. ; (3) ilokusi kolaboratif, yang memiliki tujuan ilokusi yang tidak terkait dengan tujuan sosial, seperti *menyatakan, mengumumkan, mengajarkan, menerangkan,* dsb.; dan

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

(4) ilokusi konfliktif, yang memiliki tujuan ilokusi bertentangan dengan tujuan sosial, seperti *mengancam, memarahi, memaki, menyumpahi,* dsb.

Penjelasan khusus diberikan terkait ilokusi impositif, yang secara intrinsik *discourteous* ('tidak ramah'). Untuk itu, ilokusi ini memerlukan kesantunan negatif guna melunakkan daya tekan yang dikandungnya. Kesantunan negatif adalah upaya yang dilakukan oleh penutur dalam rangka menghindari suatu konflik yang terjadi antara penutur (Pn) dan petutur (Pt) akibat adanya *imposisi* (tekanan) yang dilakukan (Pn) terhadap (Pt). Inti kesantunan negatif adalah pengelakan konflik (ibid: 208). Daya impositif suatu tuturan secara umum dapat dikurangi dengan (1) mempertinggi derajat ketaklangsungan tuturan sehingga (2) derajat kerugian pada Pt dapat dikurangi dan (3) derajat kebebasan pada Pt dapat ditambah.

Dengan menerapkan strategi ketaklangsungan Pn dapat membawa ilokusi impositif semakin dekat kearah suatu pilihan negatif sehingga mudah bagi Pt untuk mengatakan *tidak* kepada Pn. Derajat kesantunan, khususnya pada dimensi *kearifan*, berangsur naik ketika derajat ketaklangsungan sebuah ilokusi impositif ditambah. Sebuah ilokusi impositif yang mengambil bentuk imperatif, misalnya, dianggap memiliki tingkat kesantunan yang rendah, karena dapat memicu konflik sosial berupa ketidaktaatan. Bandingkan ungkapan-ungkapan yang mengandungi ilokusi impositif yang semakin tak langsung berikut:

(1) Buka pintunya.
(2) Saya ingin anda membukakan pintu.
(3) Maukah anda membukakan saya pintu? (Inggris = *Will you…?*)
(4) Dapatkah anda membukakan saya pintu? (Inggris = *Can you…?*)
(5) Mungkinkah anda membukakan saya pintu? (Inggris = *Could you possibly…*?
(6) Apakah anda tidak berkeberatan membukakan saya pintu? (Inggris = *Would you mind…* ?)

Derajat kesantunan ungkapan-ungkapan impositif di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada interpretasi *default* (terlepas dari konteks sosial) ungkapan (1) terdengar kurang santun daripada ungkapan (2). Penutur pada ungkapan (1), yang berbentuk imperatif, menuturkan sebuah perintah sedangkan pada ungkapan (2), berbentuk pernyataan, penutur hanya mengungkapkan suatu proposisi. Sebuah proposisi memiliki daya ilokusi yang tidak sekuat perintah sehingga ia terasa lebih santun. Lebih jauh, sebuah proposisi tidak menuntut respon secara langsung dari petutur berupa tindakan sehingga ia memiliki cukup ruang untuk menuruti atau mengabaikan permintaan penutur. Daya ilokusi impositif yang dikandung oleh

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

ungkapan (2) menjadi agak lunak karena penutur mengandalkan ketaatan petutur pada maksim kearifan bukan perasaan yang diselimuti suatu keharusan. Dengan sebuah pernyataan seperti pada (2) petutur ditempatkan pada posisi 'terpaksa' menuruti kemauan penutur agar ia tidak melanggar maksim kearifan (*tact maxim*). Kondisi seperti ini meminimalkan potensi rusaknya hubungan sosial antara penutur dan petutur. Bandingkan dengan (1), dimana petutur akan segera kehilangan kebebesannya jika menuruti perintah penutur atau segera merusak hubungan sosialnya dengan penutur jika ia tidak taat pada perintah penutur.

Sementara itu ungkapan pada (3), (4), (5), dan enam memiliki derajat ketimbangrasaan yang relatif lebih tinggi daripada ungkapan (1) dan (2) karena ilokusi impositif yang mereka kandung disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Sebuah ilokusi impositif yang disampaikan dengan *kalimat tanya* akan memberikan ruang *kebebasan* yang cukup pada seorang petutur untuk menjalankan atau tidak menjalankan tindakan yang diinginkan si penutur. Pemakaian kata '*Maukah*' pada ungkapan (3) mengandung sebuah implikatur bahwa si penutur menanyakan apakah petutur *ingin* membukakan pintu untuknya. Dengan, demikian penutur menempatkan dirinya dalam posisi menghormati si petutur.

Sementara itu ungkapan (4) relatif lebih santun daripada ungkapan (3) karena penggunaan kata '*Dapatkah anda…?* memiliki implikatur '*menanyakan kemampuan si petutur'*. Ungkapan (3) sesungguhnya mirip dengan ungkapan (2) dalam hal *tidak memberikan kebebasan pada si petutur untuk menolak* tindakan yang dinginkan penutur. Dengan pertanyaan '*Maukah anda* …?' sulit bagi penutur untuk berkata '*Tidak, saya tidak mau*' sebagai responnya. Jika ia melakukan hal ini maka ia akan diasumsikan oleh penutur '*lebih mementingkan keinginannya daripada keinginan penutur'* sehingga ia akan melanggar maksim ketimbangrasaan. Sebaliknya penggunaan frasa '*Dapatkah anda* ...' mengacu pada kemampuan petutur untuk melakukan tindakan yang diinginkan penutur sehingga dengan demikian si petutur diberi ruang kebebasan yang sangat lebar untuk berkata '*Tidak"* dengan alasan ketidakmampuannya melakukan tindakan dimaksud. Misalnya, si petutur dapat mengatakan '*Saya sebenarnya bisa, tapi* ....' (kondisi yang tidak memungkinkan). Dengan kata lain, tanggung jawab atas tidak terlaksananya tindakan yang diinginkan

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

penutur akan ditumpahkan pada faktor di luar keinginan si petutur. Dalam hal ini si petutur tetap dianggap santun oleh si penutur.

Ungkapan (5) dan (6) memiliki derajat kesantunan yang paling tinggi di antara bentuk-bentuk ungkapan yang disebutkan di atas karena beberapa alasan. Pertama, penggantian kata *will* dan *can* dengan bentuk lampau '*would* dan *could* dalam bahasa Inggris menandakan suatu tindakan hipotetis yang akan dilaksanakan oleh petutur. Oleh karena itu, secara teoretis petutur dapat memberikan jawaban positif tanpa sungguh-sungguh harus melakukannya. Dengan demikian imposisi yang dikandung oleh ungkapan seperti pada (5) dan (6) akan semakin tipis. Alasan berikutnya adalah bahwa bentuk-bentuk hipotesis tidak meliliki bentuk *protasis* yang tampak dengan jelas, yakni bentuk yang tidak dapat dipahami sebagai pertanyaan yang menanyakan kemampuan dengan sungguh-sungguh seperti *will* dan *can* (waktu kini). Sebab itu, dalam bahasa Inggris, ungkapan '*Would you…?* dan '*Could you…?* digunakan untuk menunjukkan kesantunan secara formal karena memiliki fungsi pragmatik yang khusus.

Ditilik dari ranah semantiknya, verba ilokusi impositif atau direktif dapat diberi batasan dengan cara menggunakan sederet variable diskret seperti yang dilakukan dalam analisis komponen. Variabel-variabel tersebut antara lain meliputi (1) waktu, (2) keterlibatan penutur atau petutur dalam tindakan yang terjadi, (3) kebersyaratan (*conditionality*), (4) keuntungan / kerugian bagi penutur atau petutur, dan (5) sikap yang terimplikasi. Dengan demikian, makna verba ilokusi impositif dapat kita perikan sebagai berikut.

Pertama, verba-verba impositif hanya menyangkut tindakan-tindakan yang terjadi di masa mendatang. Artinya, ketika seorang penutur menggunakan tindak tutur impositif, maka ia selalu mengacu pada kejadian setelah tindak ujar dilaksanakan. Dalam ujaran 'Tolong bukakan pintu!' misalnya, kejadian terbukanya pintu yang melibatkan petutur terjadi setelah ujaran tersebut dilontarkan. Kasus ini berlawanan dengan kejadian yang terkait dengan tindak tutur ekspresif, yang selalu mengacu pada tindakan yang terjadi di masa lampau. Tuturan ekspresif seperti '*Maaf tadi aku buka pintu ketika dia datang*' tampak jelas bahwa kejadian terbukanya pintu telah terjadi sebelum tindak tutur ekspresif dituturkan.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Mengacu pada variabel kedua, verba impositif memiliki makna bahwa sebuah kejadian (X) menjadi tanggung jawab dan harus dilaksanakan oleh petutur yang terlibat di dalam peristiwa tutur yang sedang terjadi. Hal ini berlawanan dengan makna yang dikandung oleh verba komisif, dimana tanggung jawab pelaksanaan tindakan yang ada dalam proposisi tuturan ada pada penutur. Tuturan impositif 'Pegilah ke rumahnya!' terkandung makna bahwa yang harus pergi adalah si petutur bukan si penutur yang mengucapkan ujaran tersebut. Sebaliknya dalam tuturan komisif, ' Saya berjanji akan pergi ke rumahnya' terkadung makna bahwa individu yang pergi adalah si penutur bukan si petutur.

Pada variabel kebersyaratan, verba impositif dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni 'bersyarat' atau 'tidak bersyarat'. Kelompok verba yang dikategorikan bersyarat meliputi *request*, *beg*, *advise*, *recommend*, *suggest*,dan *invite* sedangkan kelompok yang 'tidak bersyarat' mencakupi *tell*, *command*, *demand*, dan *ask*. Verba yang ditandai 'bersyarat' menyiratkan makna bahwa penutur menganggap bahwa kejadian tidak akan berlangsung jika tidak ada persetujuan atau kesediaan dari petutur. Sebaliknya, verba yang diberi tanda 'tak bersyarat' memiliki makna bahwa persetujuan atau kesediaan penutur merupakan suatu kewajiban atau keharusan. Dalam tuturan 'Saya perintahkan anda pergi sekarang juga' menyiratkan bahwa, dalam benak si penutur, si petutur harus pergi tanpa ada pertimbangan bersedia atau tidak bersedia. Akan tetapi tuturan 'Saya sarankan anda pergi ke dokter' menyiratkan bahwa dalam benak si penutur, si petutur bisa pergi jika ia bersedia atau tidak pergi jika ia tidak bersedia.

Pada variabel untung-rugi, verba impositif memiliki makna bahwa sebuah kejadian (X) di masa mendatang menguntungkan si penutur dan merugikan si petutur yang terlibat di dalam peristiwa tutur yang sedang terjadi. Hal ini berlawanan dengan makna yang dikandung oleh verba komisif, dimana pihak yang diuntungkan adalah si petutur dan dan pihak yang dirugikan adalah si penutur. Tuturan impositif 'Ambilkan aku segelas air!' terkandung makna bahwa tindakan si petutur dalam mengambil segelas air jelas menguntungkan si penutur yang mengucapkan ujaran tersebut. Sebaliknya dalam tuturan komisif, 'Saya berjanji akan membelikan kamu baju baru' terkandung makna bahwa si petutur diuntungkan karena ia akan mendapat baju baru.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilokusi impositif adalah sebagian tindak tutur direktif yang secara psikologis memberikan *imposisi* atau pembebanan pada Pt karena di dalamnya terdapat unsur-unsur (1) kerugian pada diri Pt, (2) ketidakramahan Pn, dan atau (3) mengancam muka negatif Pt.

6. Teori Kesantunan

Bagian berikut mengulas teori kesantunan yang dikemukakan oleh para pakar yang sangat berpengaruh, yakni Leech (1983) dan Brown dan Levinson (1978/87). Masing-masing pandangan pakar terhadap kesantunan tersebut disajikan pada bagian-bagian berikut.

a. Teori Kesantunan Leech

Teori kesantunan Leech (1987) didasarkan pada skala untung-rugi (*cost-benefit*). Nosi untung-rugi ini diwujudkan dalam maksim-maksim kesantunan. Jadi kesantunan dipahami sebagai upaya untuk meminimalisasi kerugian dan memaksimalkan keuntungan bagi petutur.

Di samping itu, kajian kesantunan Leech ini terkait erat dengan prinsip PK Grice (1972). Ia menyatakan bahwa sopan santun adalah mata rantai yang hilang antara PK dengan keterkaitan antara daya dan makna. Dalam hal ini ia menjelaskan bahwa prinsip kesantunan (PS) yang ia kemukakan merupakan upaya untuk meyelamatkan PK Grice utamanya dalan hal kekurangpadaan penjelasan mengenai hubungan antara makna dan daya. Tujuan utama PS adalah menciptakan dan memelihara rasa persaudaraan (*comity*) dalam suatu kelompok sosial (ibid, 1983; 82).

Penjelasan tentang hubungan antara makna dan daya dengan PK hanya terbatas pada pemecahan masalah-masalah yang timbul dalam semantik yang didasarkan pada pendekatan *truth-based approach*, yang mementingkan makna proposisi. Tetapi di sisi lain PK tidak dapat menjelaskan mengapa cara-cara yang tidak langsung sering digunakan seorang penutur untuk menyampaikan maksudnya. Untuk itu, Leech mengemukakan bahwa penjelasan hubungan antara makna dan daya perlu dipandang dari sudut sosial psikologis sehingga prinsip-prinsip pragmatik dapat diterapkan secara lebih luas.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Dalam suatu pertuturan, maksim-maksim percakapan Grice sering dilanggar oleh para peserta tutur. Menurut Leech, pelanggaran terhadap maksim-maksim Grice ini menunjukkan fakta bahwa di dalam percakapan, seorang penutur sering lebih mengutamakan terwujudnya kelancaran komunikasi dan keharmonisan sosial daripada efektivitas penyampaian informasi. Dengan perkataan lain, di dalam melaksanakan interaksi sosial melalui bahasa, seorang penutur seringkali lebih mematuhi prinsip kesantunan daripada prinsip kerjasama dalam situasi-situasi tertentu. Perhatikan contoh berikut:

A: Wah, calon gubernur kita, Pak Naryo dan Pak Karwo, sama-sama bagus, ya?
B: Saya kira pak Naryo cukup bagus.

Dalam percakapan di atas, B tampaknya melanggar maksim kuantitas karena ia tidak mencukupkan informasinya, dengan hanya mengomentari kualitas Pak Naryo saja tanpa mengatakan apa-apa tentang Pak Karwo sebagai calon gubernur. Dengan demikian implikatur yang muncul dari percakapan di atas adalah bahwa B kurang sependapat dengan A atas kualitas Pak Karwo. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa B memilih implikatur tersebut alih-alih berkomentar secara eksplisit tentang kualitas Pak Karwo? Di sinilah terlihat jelas bahwa motivasi B yang memilih menahan sebagian pendapatnya adalah agar ia dapat berlaku santun kepada A dengan tidak mau berseberangan pendapat tentang kualitas Pak Karwo sebagai calon gubernur.

Leech merumuskan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh peserta tutur dalam suatu peristiwa tutur, yang kenal dengan *the don'ts*, untuk membimbing mereka berbahasa secara santun. Rumusan *the don'ts* tersebut adalah (1) jangan menyuruh (2) jangan menuturkan hal yang buruk tentang mitra tutur, (3) jangan mengungkapkan perasaan senang pada mitra tutur yang sedang bersedih, (4) jangan berseberangan dengan pendapat atau pandangan mitra tutur, dan jangan memuji diri sendiri tentang kekayaan atau kekuatan yang dimiliki. Secara lebih *detail* larangan-larangan tersebut dijabarkan di dalam tujuh bidal kesantunan yang akan dipaparkan dalam bagian berikut:

1) Maksim Ketimbangrasaan (*tact maxim*)
   (a) Minimalkan biaya (*cost*) pada orang lain.
   (b) Maksimalkan keuntungan (*benefit*) pada orang lain.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Contoh: Dalam antri menunggu angkutan umum, misalnya, ujaran '*Silahkan naik dulu, saya belakangan saja*' akan terdengar lebih sopan daripada '*Saya mau naik duluan*!'

2) Maksim Kemurahhatian (*generosity maxim)*

(a) minimalkan keuntungan pada diri sendiri.

(b) maksimalkan biaya pada diri sendiri.

Contoh: Dalam suatu perhelatan ujaran '*Biar saya ambilkan minum'* akan terdengar lebih sopan daripada '*Tolong ambilkan saya minum!*'

3) Maksim Pujian (*approbation maxim*)

(a) minimalkan pencelaan (*dispraise*) pada orang lain.

(b) maksimalkan pujian (*praise*) pada orang lain.

Contoh: Dalam berbasa-basi, ujaran '*Wah bagus sekali rumahnya ya Pak?'* akan terdengar lebih sopan daripada '*Rumah Bapak kok catnya kurang pas ya?*'

4) Maksim Kerendahhatian (*modesty maxim*)

(a) minimalkan pujian pada diri sendiri.

(b) maksimalkan pencelaan pada diri sendiri.

Contoh: Dalam berbincang dengan teman lama, misalnya, ujaran '*Ah mobil ini sudah cukup tua kok'* akan terdengar lebih sopan daripada '*Mobil siapa dulu dong, pasti mahal!*'

5) Maksim Kesepakatan (*Agreement maxim*)

(a) minimalkan ketidaksepakatan (*disagreenent*) antara diri sendiri dengan orang lain.

(b) maksimalkan kesepakatan (*agreement*) antara diri sendiri dengan orang lain.

Contoh: Dalam suatu pertemuan, misalnya, ujaran '*Saya melihat hal yang sama dengan yang anda kemukakan*' akan terdengar lebih sopan daripada '*Saya kira pendapat anda kurang tepat dalam hal ini!*'

6) Maksim Simpati (*sympathy maxim*)

(a) minimalkan antipati antara diri sendiri dengan orang lain.

(b) maksimalkan simpati antara diri sendiri dengan orang lain.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Contoh: Dalam mendengar berita buruk, misalnya, ujaran '*Saya turut bersedih atas kecelakaan yang menimpa saudaramu!'* akan terdengar lebih sopan daripada '*Saya dengar saudaramu kecelakaan ya, emang sih dia itu suka ngebut di jalan!*'

7) Maksim Pertimbangan (*consideration maxim*)

Inti sari maksim ini adalah bahwa pertimbangan tertentu yang diberikan atas pendapat orang lain dianggap dapat menunjukkan suatu kesantunan daripada tidak sama sekali.

Contoh: Dalam suatu pertemuan, ujaran untuk mengomentari pendapat orang lain, misalnya, '*Saya kira usulan anda sedikit mengandung kelemahan tetapi masih dapat kita pertimbangkan lebih lanjut.*', akan terdengar lebih santun daripada '*Usulan anda kurang mendasar dan tidak akan dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan ini!*'

Maksim (7) adalah maksim yang ditambahkan oleh Leech untuk melengkapi maksim-maksim (1) – (6). Ketujuh maksim yang dikemukakan di atas pada hakekatnya merupakan pedoman dalam melaksanakan interaksi verbal dengan orang lain dalam rangka memelihara muka mitra tutur sehingga keharmonisan sosial tetap terpelihara. Dalam kesantunan Leech, konsep 'muka' dijaga dengan meletakkan diri sendiri pada 'kutub negatif' dan meletakkan orang lain pada 'kutub positif' pada suatu skala tertentu. Secara ringkas, maksim-maksim kesantunan tersebut mencerminkan skala-skala: (1) biaya dan maslahat (*cost and benefit*), (2) pencelaan dan pujian (*dispraise and praise*), (3) kesepakatan dan ketidaksepakatan (*agreement and disagreement*) dan (4) simpati dan antipati (*sympathy and antipathy).*

Di samping prinsip kesantunan yang dijabarkan ke dalam maksim-maksim, Leech juga mengajukan prinsip *irony* dan *banter*. Yang pertama itu sering juga disebut dengan *mock-politenes,* yang mengacu pada ujaran yang nampak santun tetapi sebenarnya mengandung daya yang tidak santun bahkan kasar karena terdapat ketidaktulusan penutur dalam tuturan yang ia ungkapkan. Suatu misal, ujaran '*Wah bersih sekali bajumu!* dapat menjadi suatu *irony* jika ditujukan untuk mengomentari seorang petutur yang berbaju kotor pada saat terjadi peristiwa tutur dimaksud.

Sementara itu, prinsip *banter* atau disebut juga *mock-impoliteness* adalah kebalikan dari irony, yakni pada ujaran yang tampaknya tidak santun namun sebenarnya menunjukkan pendeknya jarak sosial antara penutur dan petutur. Misalnya

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

ujaran *'Eh, kirain lu udah mati! Kemana aja selama ini?'* dapat menunjukkan keintiman jika dikatakan oleh seorang penutur yang lama sekali tidak ketemu sahabat karibnya. Ujaran tersebut tampak tidak santun tetapi menjadi santun karena digunakan oleh peserta tutur yang memiliki hubungan khusus dan sangat dekat dalam hal jarak sosial.

Selain prinsip-prinsip retorika interpersonal, Leech juga mengemukakan dua strategi, yakni performatif berpagar (*hedged performatives*) dan bidal fatis (*phatic maxim),* terkait dengan aspek kesantunan dalam pragmatik. Strategi pertama digunakan untuk menghindari ujaran langsung, yang pada umumnya dianggap tidak santun karena mengandungi daya ilokusi yang tidak memberikan pilihan pada diri penutur. Contoh:

[1] 'Tolong bantu saya!'
[2] 'Jika anda tidak berkeberatan, tolong bantu saya!'

Ujaran [1] tidak mengandung *pagar* dan oleh karena itu terdengar kurang sopan daripada ujaran [2], yang mengandungi ilokusi yang taklangsung yang memberikan suatu pilihan pada petutur untuk berkata *ya* atau *tidak* sebagai akibat dari penggunaan pagar '*Jika anda tidak berkeberatan'*.

Sementara itu bidal fatis merupakan alat untuk menghindari kesenyapan di dalam suatu peristiwa tutur. Dalam suatu percakapan yang sedang berlangsung, peserta tutur diharapkan dapat menjaga kelancaran proses percakapan sedemikian rupa sehingga keduanya dapat menghindari kesenyapan, yang dapat mengisyaratkan kebekuan atau ketidakhangatan hubungan sosial di antara mereka. Sebaliknya kelancaran komunikasi yang diupayakan melalui bidal fatis adalah suatu isyarat adanya hubungan sosial yang baik di antara peserta tutur. Bidal fatis mengajurkan peserta tutur untuk menggunakan ujaran-ujaran yang mengandungi informasi-informasi yang telah diketahui antara penutur dan petutur untuk menunjukkan kesantunan, misalnya:

A: 'Putranya sudah dapat kerjaan ya Bu?'
B: 'Ya, Alhamdulillah berkat doanya'.

Pertanyaan A pada B tidak benar-benar digunakan untuk menggali informasi tetapi hanya merupakan ungkapan fatis yang ditujukan untuk menunjukkan kesantunan guna menjaga hubungan sosial.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

b. Teori Kesantunan Brown dan Levinson

Teori kesantunan Brown & Levinson (1978) pada dasarnya adalah teori kesantunan perilaku strategis (*strategic behavior)*, yang terkait dengan bagaimana seseorang bertindak atau berbicara agar mitra tutur tidak kehilangan muka (*to loose face*). Tema pokok yang digunakan sebagai alat utama dalam penjelasan konsep kesantunan Brown dan Levinson adalah *rasionalitas* dan *muka*. Kedua tema sentral tersebut diyakini sebagai ciri-ciri universal yang dimiliki oleh semua peserta tutur di dunia dan dipersonifikasikan dalam *Model Person*. Rasionalitas mengacu pada daya nalar atau logika sedangkan muka mengacu pada keinginan.

Pada awalnya istilah 'muka' dipakai oleh Goffman (1956) yang berusaha menganalisis struktur interaksi sosial (Hubler, 1983). Ia menjelaskan bahwa secara sosiopsikologis perilaku sosial anggota-angota masyarakat itu tidak berbeda jauh dengan para pemain sandiwara. Seperti halnya pemain sandiwara, setiap partisipan di dalam interaksi sosial harus menampilkan 'muka', yakni suatu citra diri publik yang dimiliki oleh setiap orang dengan sebaik mungkin sesuai peran yang dimainkannya. Dalam hal ini, muka harus diusahakan sendiri oleh seorang pemain dan sekaligus harus didukung dan dijaga oleh pemain lain sehingga tidak ada muka yang jatuh. Dalam interaksi sosial, setiap peserta interaksi berkewajiban menjaga mukanya sendiri dan sekaligus memelihara muka mitra tuturnya sehingga tidak ada muka yang dipermalukan, terhina atau hilang.

Di dalam teori kesantunan Brown dan Levinson (1978: 62), konsep muka (*face)* didefinisikan sebagai '*...basic wants, which every member knows every other member desires, and which in general it is in the interest of every member to partially satisfy'*. Jadi, muka adalah suatu keinginan yang bersifat azasi yang melekat pada setiap anggota masyarakat dan secara umum setiap individu lainnya dan mereka berminat untuk memenuhi keinginan tersebut. Selanjutnya, muka diasumsikan oleh kedua pakar tersebut memiliki dua aspek: (1) muka positif, yakni keinginan setiap individu yang berakal sehat untuk dihargai atau diterima segala tindakan dan keinginannya oleh orang lain, dan (2) muka negatif, yakni keinginan individu untuk bebas dari pemaksaan atau kewajiban melaksanakan sesuatu (*imposition*) dan atau tidak dihalang-halangi segala tindakan dan keinginannya oleh orang lain.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Terkait dengan konsep muka tersebut maka diasumsikan bahwa setiap ujaran dalam peristiwa komunikasi berpotensi mengandungi tindak mengancam muka (*Face Threatening Act)*, baik pada muka penutur maupun pada muka petutur. Suatu tindak tutur dapat mengancam muka orang lain karena isi dan atau cara pengucapannya. Bagi manusia percontoh (*model person*), yang tidak asal bunyi dalam bertutur, selalu berusaha memitigasi tuturan-tuturan yang mengandungi tindak mengancam muka (FTA). Tindakan pelunakan atau mitigasi ini disebut tindak menyelamatkan muka *(Face Saving Acts= FSA)* sebagai kompensasi terjadinya FTA yang tidak dapat dihindari agar hubungan sosial di antara peserta pertuturan tetap harmonis. Dari sinilah dapat disarikan bahwa kajian kedua pakar kesantunan itu terarah pada strategi pengelolaan muka (*face-management*), yaitu suatu upaya yang seharusnya dilakukan penutur untuk menunjukkan, memelihara, dan menyelamatkan muka petutur dalam suatu percakapan.

Bagi seorang peserta tutur yang rasional *(model person)*, dalam arti berpikiran sehat dan normal, berbahasa dengan santun berarti suatu keharusan memilih strategi yang disesuaikan dengan situasi pertuturan, dengan mempertimbangkan hal-hal seperti kepada siapa ia bertutur, dimana, tentang apa, apa tujuannya, dan sebagainya. Secara teoretis, untuk dapat memilih suatu strategi yang tepat seorang penutur harus 'menghitung' bobot keterancaman muka atau *weightiness of an FTA (Wx)*, yang merupakan total penjumlahan dari unsur-unsur *distance* (D), *power* (P), dan *ranking of imposition* (Rx). Secara matematis, bobot FTA itu dinyatakan dalam hubungan berikut:

Wx = D (S,H) + P (S,H) + Rx,

dimana Wx merupakan besaran nilai yang menunjukkan bobot FTA, D(S,H) adalah nilai yang menunjukkan besarnya faktor jarak sosial antara penutur (S) dan petutur (H), P(S,H) adalah besaran dari faktor kuasa dalam diri petutur (H) terhadap penutur (S), dan Rx merupakan status relatif jenis imposisi di dalam budaya yang bersangkutan.

Faktor-faktor P, D, dan Rx tersebut bersifat *culture specific* (Brown dan Levinson, 1978:). Faktor kekuasaan P (S, H) dapat memiliki besaran maksimal jika petutur (H) sangat berpengaruh, misalnya kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pangeran, dukun sakti, pendeta, ustad, dan sebagainya. Sementara itu, faktor jarak

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

sosial (D) dapat diukur berdasarkan tingkat frekuensi interaksi antara penutur dan petutur. Dan Rx merupakan pemeringkatan kultural suatu tindak tutur, yakni seberapa 'mengancam atau membahayakan' suatu tindak tutur dipersepsikan dalam latar budaya tertentu. Berdasarkan perhitungan faktor-faktor P, D dan R itulah penutur rasional yang berkompeten secara linguistik dan budaya tertentu menentukan strategi untuk menghindari tindak tutur mengancam muka (FTA). Dengan perkataan lain, penutur rasional selalu memperhitungkan bobot relatif terhadap keinginan-keinginannya untuk (a) mengkomunikasikan isi FTA, (b) bersikap lebih efisien atau darurat dalam menyampaikan isi FTA, dan (c) memelihara muka petutur pada derajat tertentu. Jika ia ingin bersikap santun, dalam arti ingin meminimalkan FTA dalam ujarannya, maka ia harus mengecilkan keinginannya untuk bersikap lebih efisien dalam menyampaikan FTA dan sekaligus membesarkan keinginannya untuk memelihara muka petutur.

Dengan demikian seorang Model Person memilih suatu strategi tertentu yang mendasari penyusunan bentuk-bentuk kebahasaan yang akan ia gunakan berdasarkan hasil perhitungan yang ia lakukan terhadap penjumlahan variabel-variabel P, D dan R. Selanjutnya hasil perhitungan itulah yang mengarahkannya untuk memilih strategi-strategi kesantunan seperti (1) *bald on record*, (2) *positive politeness*, (3) *negative politeness*, (4) *off record*, dan (5) *don't do FTA*.

Menurut Brown dan Levinson (1978/1987) dalam setiap peristiwa pertuturan, seorang petutur selalu diletakkan pada situasi '*Do the FTA'*, yang berarti bahwa penutur harus mengeluarkan ujaran sehingga FTA tidak dapat dihindari, dan pada situasi *Don't do the FTA*, yang berarti penutur tidak mengeluarkan ujaran atau diam saja. Dalam situasi *Do the FTA* inilah penutur harus memilih apakah ia harus melakukan FTA dengan terus terang (*on record*) atau melakukannya dengan samar-samar (*off record).* Selanjutnya, jika ia memilih melakukan FTA dengan terus terang (*on record*), maka untuk tetap bersikap santun ia dapat melakukannya dengan disertai tindakan pelunakan atau mitigasi (*with redressive action)* terhadap daya FTA dalam tuturannya. Untuk ini, penutur dapat memilih strategi kesantunan positif (*positive politeness*) dan kesantunan negatif (*negative politeness*). Yang pertama itu menekankan pada asumsi bahwa seorang penutur dan petutur memiliki kepentingan yang hampir sama dan merupakan bagian dari kelompok sosial yang sama sedangkan

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

yang kedua mengacu pada asumsi bahwa seorang penutur menyadari adanya jarak sosial dengan petutur dan tidak ingin mengganggu kebebasannya. Sebaliknya, FTA dapat dilakukan dengan tanpa basa-basi dan tanpa disertai tindakan pelunakan (*without redressive action* atau *bald on record)* terhadap daya FTA dalam tuturan, jika ia lebih mementingkan efisiensi penyampaian pesan atau tindak tutur yang ada di benaknya daripada bersikap santun kepada mitra wicaranya.

Kelima strategi kesantunan tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Pertama, melakukan tindak tutur secara terus terang atau apa adanya (*bald on record)* dapat dilakukan oleh penutur dalam peristiwa komunikasi darurat atau bahaya sehingga pemakaian ungkapan yang dianggap santun tidak diperlukan. Tuturan-tuturan yang termasuk dalam strategi kesantunan ini adalah peringatan-peringatan dalam situasi bahaya seperti: *"Awas ada buaya!', 'Cepat keluar ada kebakaran!', 'Banjir-banjir!'* dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan seperti ini tidak mengandung imposisi dan tidak mengancam muka karena ditujukan demi keselamatan petutur.

Kedua, strategi kesantunan positif utamanya ditujukan untuk menyelamatkan muka positif dengan menunjukkan kedekatan, keintiman, dan hubungan sosial yang baik antara penutur dan petutur. Sebagai penjabaran starategi ini, terdapat lima belas cara yang dapat dilakukan oleh penutur yaitu:

1) Mengungkapkan 'kesamaan pijakan' (*common ground)* dengan memperhatikan keinginan, keperluan, minat atau segala sesuatu yang menjadi milik penutur. Ungkapan yang berupa pujian atau penghargaan termasuk dalam strategi ini. Contoh: *'Wah, keren sekali jaketmu, Ton'*.
2) Membesar-besarkan minat, simpati, dan dukungan kepada petutur. Contoh: '*Saya salut dengan usahamu, teruskan!'*
3) Memperhatikan petutur dengan sungguh-sungguh, Contoh: *'Sudah sarapan pagi, Cha?'*
4) Menggunakan bentuk-bentuk identitas kelompok. Contoh: '*Bagaimana kabarnya Bung!'*
5) Mencari kesepakatan. Contoh: '*Ya. Saya kira Anda benar'*.
6) Menghidari ketidaksepakatan. Contoh: '*Saya kira kita hanya berbeda perspektif dalam hal ini'*.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

7) Menyiratkan, menonjolkan, menyatakan kebersamaan. Contoh: *'Nggak usah terlalu dipikir. Nanti Kalau aku butuh kan ke kamu juga'.*
8) Berkelakar, Contoh: '*Wah tambah makmur ya sekarang'.*
9) Menyatakan atau menyiratkan pengetahuan dan perhatian terhadap keinginan petutur. Contoh: '*Aku mengerti kesulitanmu'.*
10) Menawarkan atau menjanjikan sesuatu. Contoh: *'Kapan-kapan aku main ke rumah ya?'*
11) Bersikap optimistik. Contoh: '*Ah, masih banyak cowok yang suka kamu'.*
12) Melibatkan petutur dalam suatu kegiatan. Contoh: '*Mari kita bernyanyi bersama, OK?'*
13) Memberikan atau meminta alasan. Contoh: *'Aduh udaranya panas sekali. Dibuka saja ya jendelanya?'*
14) Menyiratkan atau menyatakan hal yang timbal balik. Contoh: *'Kemarin kamu yang bayar. Sekarang ganti aku'.*
15) Memberi sesuatu (hadiah, simpati, pengertian, dan kerja sama) kepada petutur. Contoh: '*Ini lho kubawakan bakso favoritmu'.*

Ketiga, strategi kesantunan negatif ditujukan untuk menyelamatkan muka negatif. Kesantunan ini sebenarnya digunakan untuk menunjukkan adanya jarak sosial (*social distance)* antara penutur dan petutur. Ada sepuluh cara untuk menyatakan strategi kesantunan ini, yakni:

1) Menggunakan tindak tutur tak langsung konvensional. Contoh: *'Anda yang menutup pintu*?'
2) Menggunakan pertanyaan atau pemagaran (*hedging*). Contoh: '*Kalau bapak berkenan*, dapatkah Bapak hadir?'
3) Bersikap pesimistik. Contoh: *'Ayah pasti nggak memberikan ijin aku. Aku mau camping boleh?*'
4) Melakukan imposisi seminimal mungkin. Contoh: '*Mari saya bantu membersihkan ruangan ini'.*
5) Menggunakan bentuk penghormatan (*deference).* Contoh: *'Seyogyanya Bapak yang membuka rapat ini'.*
6) Meminta maaf. Contoh: '*Maaf, saya tidak memperhatikan Anda tadi'.*

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

7) Menghindari penggunaan pronomina *saya* atau *anda*. Contoh: '*Lebih baik diperiksakan* ke dokter sebelum penyakitnya parah.'
8) Menggunakan tindak tutur mengancam muka (FTA) yang telah dianggap lazim. Contoh: 'Bapak-Ibu wajib *berseragam KORPRI'*.
9) Menggunakan bentuk nominalisasi. Contoh: *'Sumbangan dan bantuan* anda kami harapkan'.
10) Menyatakan seakan-akan berhutang budi atau mengatakan hal-hal yang membuat petutur senang. Contoh: *'Kalau ngga ada anda, apa tadi jadinya saya'*.

Keempat, strategi kesantunan *off record*, yakni melakukan tindak tutur secara samar atau tidak transparan. Strategi ini dijabarkan menjadi lima belas cara dalam hal ini, yaitu:

1) Memberi isyarat. Contoh: '*Wah lapar sekali nih*' (=Sediakan makanan).
2) Memberi petunjuk asosiasi. Contoh: '''*Aduh maag ku kambuh lagi*'. (= Belikan obat maag).
3) Menggunakan praanggapaan (*presupposition*). Contoh: '*Setidaknya saya tak menyombongkan kekayaan saya*'.
4) Menggunakan ungkapan pengecilan makna (*understate)*. Contoh: *'Hanya luka kecil, nanti juga sembuh.*(= luka cukup serius)
5) Menggunakan ungkapan yang berlebihan (*overstate)*. Contoh: 'saya coba nelpon *ratusan kali* kok nggak diangkat?'
6) Menggunakan tautologi. Contoh: '*Koruptor tetap aja pencuri'*.
7) Menggunakan kontradiksi. Contoh: 'Dibilang *senang gak senang*, dibilang *sedih* ya *nggak* juga'. Ya tergantung.
8) Menggunakan ironi. Contoh: '*Tono berhati emas*' (= Tono orang yang egois dan kikir).
9) Menggunakan metafora. Contoh: 'Susan benar-benar belut' (=Susan pandai sekali Melepaskan diri dari kesulitan)
10) Menggunankan pertanyaan retorik. Contoh: 'Berapa kali Anda sudah saya peringatkan?'
11) Menggunakan ungkapan yang taksa. Contoh: 'Wah ada yang nggak ketiban rejeki nih'. (Makna tergantung konteks).

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

12) Menggunakan ungkapan yang maknanya tidak begitu jelas (*vague).* Contoh: 'Sepertinya ada yang minum kopi saya deh'.

13) Menggunakan generalisasi yang berlebihan (*over generalization).* Contoh: 'Orang yang berpengalaman akan lain dalam menyelesaikan masalah, percalah!'

14) Menggunakan ungkapan yang tidak mengacu kepada petutur secara langsung. Contoh: 'Kek, tolong bantu angkat beras ini!' (sebenarnya permohonan bantuan ditujukan ke orang yang lebih muda).

15) Menggunakan elipsis. Contoh: 'Wah saya bisa …' (=Saya bisa demam panggung nih. Lebih baik kamu yang pidato nanti, jangan saya).

Strategi yang terakhir adalah tidak melakukan tindak tutur mengancam muka (FTA). Dalam hal ini, penutur memilih bertutur dalam hati dalam arti tidak mengatakan apa-apa kepada petutur dalam peristiwa komunikasi karena ujarannya kurang pantas dijawab.

[8] A: Tetangga baru kita itu PNS saja kok mewah sekali gaya hidupnya. Kok tiap hari beli barang baru.
B: …. (Diam tidak merespon)

Pada intinya, Brown dan Levinson (1978/1987) memandang Kesantunan sebagai suatu bentuk perilaku yang dipilih, diputuskan, dan digunakan secara strategis oleh seorang individu. Dengan demikian, kajiannya lebih diarahkan kepada strategi dan super-strategi yang harus dipertimbangkan masak-masak oleh seorang penutur sebelum ia bertutur atau bertindak (Eelen, 2001). Strategi dan super-strategi itu selanjutnya disebut kesantuan positif dan kesantunan negatif, yang terkait pula dengan nosi muka positif dan muka negatif.

7. Perbandingan Model Teori Kesantunan

Pada bagian ini, penulis membandingkan secara kritis beberapa model teori kesantunan yang berpengaruh seperti Lakoff (1990), Leech (1983), Brown dan Levinson (1978), Blum-Kulka (1992) serta Fraser dan Nolen (1990) dalam rangka memperjelas perspektif dan posisinya dalam pembahasan tentang fenomena kesantunan berbahasa. Secara garis besar, masing-masing model tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa perspektif umum, yakni: (1) perspektif Maksim Percakapan (MP), (2) perspektif Penyelamat Muka (PM), (3)) perspektif Norma Sosial (NS), dan (4) perspektif Kontrak Percakapan (KP).

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Perspektif MP dikemukakan oleh Lakoff (1990) dan Leech (1983). Kedua pakar ini berupaya menjelaskan konsep kesantunan dengan mengaitkannya dengan PK Grice. PK beserta maksim-maksimnya menduga bahwa pada dasarnya para peserta tutur itu saling bekerjasama dan berusaha seinformatif mungkin dalam berkomunikasi. PK menjelaskan bagaimana para peserta tutur dapat memahami satu sama lain di luar makna kata-kata harfiah yang mereka gunakan dalam percakapan.

Namun dalam situasi informal, PK dan maksim-maksimnya seringkali tidak ditaati oleh peserta tutur. Kecenderungan ini diterangkan oleh Lakoff (1990) dengan mengemukakan Kaidah kesantunan (*Politeness rule*) sebagai pelengkap PK. Ketidaktaatan peserta tutur terhadap PK diakibatkan sikap peserta tutur yang lebih mengutamakan isu-isu sosial seperti tidak ingin menyinggung lawan tuturnya daripada mengutamakan kejelasan isi tuturannya.

Sejalan dengan Lakoff (1990), Leech (1983) juga mengusulkan prinsip kesantunan (PS) sebagai pelengkap PK Grice dalam rangka menjelaskan kecenderungan ketidaktaatan terhadap PK dalam situasi percakapan sehari-hari. Misalnya, pelanggaran terhadap maksim kuantitas akan memicu proses pemahaman tambahan terhadap tuturan seorang penutur oleh petutur. Dengan demikian Leech (1983) menekankan bahwa pelanggaran terhadap PK secara umum disebabkan sikap penutur yang ingin menjunjung prinsip kesantunan.

Persamaan konsep kesantunan Lakoff (1990) dan Leech (1983) adalah bahwa keduanya mendefinisikan kesantunan sebagai upaya pengelakan konflik (*conflict avoidance*). Lakoff (1990) secara eksplisit mendefinisikan kesantunan sebagai '[…] suatu sistem hubungan interpersonal yang dirancang untuk melancarkan interaksi dengan cara meminimalkan potensi konflik dan konfrontasi yang secara alami terdapat dalam semua bentuk hubungan antar manusia' (Lakoff, 1990). Konsep kesantunan Leech juga diarahkan pada pengelakan konflik yang diwujudkan dalam pikiran-pikiran yang dikandung oleh maksim-maksim PS dan pengakuannya bahwa kesantunan digunakan untuk membina kerukunan (*comity*).

Adapun perbedaan yang dapat dicatat antara konsep kesantunan Lakoff (1990) dan Leech (1983) adalah sebagai berikut. Pertama kerangka kerja dalam penyusunan kaidah kesantunan Lakoff (1990) berbeda dengan kerangka kerja Prinsip Kesantunan Leech (1983). Kaidah kesantunan Lakoff (1990) sangat terpengaruh oleh Linguistik

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Generatif, khususnya Semantik Generatif. Lakoff (1990) mengusulkan bahwa kaidah kesantunannya harus dilihat sebagai bagian dari suatu sistim kaidah Pragmatik dalam rangka merumuskan kompetensi Pragmatik. Dengan demikian, kaidah kesantunan utamanya merupakan alat linguistik (*linguistic tool*) untuk menangkap sistematika proses kajian sebagaimana kaidah sintaktik yang berada di dalam ranah kajian linguistik (Eelen, 2001). Sementara itu kesantunan Leech (1983) diletakkan dalam penyusunan suatu model pragmatik umum, bukan kompetensi pragmatik. Pendekatan yang digunakan Leech (1983) untuk mengkaji Pragmatik umum adalah retorika, yang secara umum mengacu pada penggunaan bahasa secara efektif dalam bahasa sehari-hari. Jadi Leech (1983) tidak berminat merumuskan kaidah-kaidah formal bahasa sebagimana dalam ranah kajian sintaksis dan semantik. Ia menegaskan bahwa semantik berorientasi kaidah (*rule-governed*) sedangkan pragmatik umum berorientasi pada prinsip (*principle controlled or rhetorical*) (Leech, 1983).

Kedua, konsep kompetensi pragmatik yang diisyaratkan dalam model pragmatik umum Leech lebih kompleks dan berbobot daripada konsep kompetensi pragmatik yang diajukan oleh Lakoff (1990). Leech (1983) mengisyaratkan bahwa kompetensi pragmatik mencakup dua ranah retorika yang berbeda, yaitu interpersonal dan tekstual, yang masing-masing dijabarkan menjadi prinsip-prinsip yang cukup terperinci. Retorika interpersonal dirinci menjadi Prinsip Kerjasama, Prinsip Kesantunan, dan Prinsip Ironi sedangkan retorika tekstual meliputi Prinsip Proses, Prinsip Kejelasan, Prinsip Ekonomi dan Prinsip Pengungkapan. Fraser (1990:224) menyebut penjabaran Prinsip Kerjasama Grice oleh Leech (1983) yang cukup rinci dan cermat ini sebagai '*a grand elaboration of the conversational approach to politeness*'. Sementara itu, kompetensi kesantunan Lakoff hanya meliputi kaidah percakapan, yang sepenuhnya serupa dengan prinsip kerjasama, dan kaidah kesantunan, yang terjabar menjadi tiga kaidah saja.

Salah satu kelemahan dari pandangan Maksim Percakapan terhadap kesantunan adalah tidak adanya kejelasan terhadap tolok ukur berbagai skala nilai (untung-rugi, simpati-antipati, kesepakatan-ketidaksepakatan). Sebab itu, tuturan santun menurut Prinsip Kesantunan Leech dan Kaidah Kesantunan Lakoff tidak mudah diterapkan oleh para peserta tutur dalam suatu kegiatan komunikasi. Hampir tidak mungkin bagi

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

seorang pengguna bahasa mempertimbangkan berbagai maksim dalam Prinsip kesantunan, dan Prinsip Ironi dalam menyusun suatu ujaran.

Konsep kesantunan berdasarkan perspektif Penyelamat Muka (PM) yang dikemukakan oleh Brown Levinson (1978) memiliki tema sentral seperti ‘rasonalitas’, dan ‘muka’ yang diyakini sebagai ciri-ciri universal yang dimiliki oleh peserta tutur ideal yang disebut *Model Person*. Terkait dengan tema-tema itulah kesantunan Brown dan Levinson (1978) diletakkan, yakni pemilihan bentuk-bentuk linguistik sebagai strategi dalam melakukan tindak tutur untuk menyelamatkan atau memperbaiki muka dari suatu ancaman.

Jika ditilik dari tujuannya, kesantunan PM dan kesantunan MP sama-sama berorientasi pada pengelakan konflik (*conflict avoidance*). Brown-Levinson (1978) memandang bahwa kesantunan adalah bagian yang fundamental dalam struktur kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam ekspresi hubungan sosial (Brown dan Levinson, 1978). Dalam hal ini kesantunan memberikan cara-cara verbal untuk mengurangi dan meredakan ketegangan sosial (*social tension*) yang timbul dari maksud-maksud komunikatif yang bertentangan dengan kebutuhan dan status sosial. Jadi, kesantunan berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial terkait dengan pengendalian potensi agresi di dalam masyarakat.

Di samping itu, beberapa istilah yang dikemukakan oleh Brown Levinson (1978) hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Leech dalam rangka menerangkan konsep kesantunan. Nosi otoritas petutur (*hearer authority*) sebagai suatu unsur pengukuran terhadap skala untung-rugi dalam maksim kearifan oleh Leech hampir tidak berbeda dengan nosi kekuasaan (*power*) dalam kesantunan Brown– Levinson(1978). Baik Leech maupun Brown- Levinson memakai istilah jarak sosial (*social distance*) dengan pengertian yang hampir sama. Sebagaimana inferensi yang dibuat Brown–Levinson, Leech juga menyiratkan bahwa derajat ketaklangsungan suatu tindak tutur berbanding lurus dengan kerugian (*cost*) penutur dan berbanding terbalik dengan keuntungan (*benefit)* petutur (Periksa Watts, 2003).

Adapun perbedaan antara PM dan MP dapat diidentifikasi sebagai berikut. Perbedaan pertama terkait dengan cara penjelasan tentang esensi kesantunan. Kesantunan PM adalah strategi-strategi verbal yang dipertimbangkan oleh penutur

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

dengan mempertimbangkan faktor P, D, dan R dalam rangka memperlunak daya ilokusi yang mengancam muka. Sementara itu, kesantunan MP menekankan pada sejauh mana penutur menaati maksim-maksim dalam PS yang cenderung mengutamakan pertimbangan yang bijaksana terhadap kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri.

Perbedaan berikutnya adalah perbedaan pengertian terhadap istilah yang sama yaitu tentang kesantunan negatif dan positif. Brown–Levinson mendefinisikan kesantunan negatif sebagai pemilihan bentuk-bentuk verbal yang berisi ungkapan pengendalian diri guna menyelamatkan muka negatif sedangkan Leech mendefinisikan kesantunan negatif sebagai upaya meminimalisasi ketidaksantunan yang ada di dalam ilokusi-ilokusi yang secara alami tidak santun seperti pada tindak meminta. Sementara Brown–Levinson (1978) mendefinisikan kesantunan positif sebagai pemilihan bentuk-bentuk verbal yang berisi ungkapan solidaritas guna menyelamatkan muka positif, Leech mendefinisikan kesantunan positif sebagai upaya memaksimalkan kesantunan yang ada di dalam ilokusi-ilokusi yang secara alami santun seperti pada tindak mengundang untuk pesta.

Adapun kelemahan kesantunan PM dapat ditemukan dari beberapa kritik serius yang dikemukakan oleh beberapa kalangan. Bargeila (2000), misalnya, mengkritik bahwa Brown dan Levinson mengalami kesalahpahaman terhadap konsep ‘muka’. Konsep muka, yang dipinjam dari Goffman, sebenarnya berasal dari bahasa China, yang maknanya haruslah dipahami sesuai konteks budaya China. Ia memiliki dua elemen: (i) *mianzi*,yang berarti reputasi atau *prestige* dan (ii) *lian*, yang mengandung makna ‘penghornatan’ dari suatu kelompok masyarakat terhadap seseorang yang memiliki reputasi moral yang baik. Jadi, *mianzi* merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan sedangkan *lian* adalah sesuatu yang selayaknya dimiliki seseorang (Fukushima, 2000). Dalam konteks budaya China, *muka* secara keseluruhan adalah kepedulian terhadap seseorang yang diusahakan untuk ditempatkan pada suatu posisi yang sesuai di dalam suatu kelompok sosial atau masyarkat yang lebih luas. Nosi muka oleh Brown dan Levinson cenderung bersifat individualistik sehingga tidak cukup memberikan arah terhadap negosiasi-negosiasi yang terjadi di antara partisipan dalam suatu percakapan. Walaupun ia mencakupi cara-cara mengelola hubungan yang harmonis, ia tidak dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan kepentingan,

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

manipulasi perilaku, tekanan eksternal, dan hubungan seseorang dengan masyarakatnya sebagai bahan pertimbangan bagi seseorang untuk memilih dan memutuskan tipe bahasa yang tepat dan cocok dengan situasi percakapan yang dihadapinya.

Terkait dengan kritik ini, Held (1992:145) mengusulkan istilah 'takut' (*fear)* alih-alih istilah 'muka'. Istilah 'takut' secara jelas dapat dikaitkan dengan 'perasaan takut terhadap terjadinya ketidakharmonisan sosial, atau takut dituduh berperilaku salah, takut bahwa orang lain akan mencaci kita, atau takut atas klaim-klaim yang dapat merusak citra-diri orang lain.

Kritik serupa juga dikemukakan oleh Spencer-Oatey (2000), yang menekankan perlunya penggantian istilah 'muka' dengan istilah (*rapport management*), yang berarti pengelolaan terhadap terjadinya keharmonisan dan ketidakharmonisan di antara individu. Menurut mereka, istilah 'muka' lebih mengacu pada kepentingan atau kepedulian terhadap diri-sendiri sedangkan *rapport management* (RM) memiliki makna yang menyiratkan keseimbangan diri dan orang lain. Ia dapat digunakan untuk mencermati bagaimana bahasa digunakan dalam rangka membangun, memelihara, dan atau merusak hubungan sosial serta mencakupi pengelolaan hak-hak sosialitas, termasuk hak-hak yang telah dikonsepsikan dalam istilah 'muka'.

Jadi, konsep ini lebih menekankan aspek-aspek sosial dalam kesantunan. RM terdiri dari dua komponen, yakni (i) pengelolaan muka (*face management*) dan pengelolaan hak-hak sosialitas (*the management of sociality rights*) (Spencer Oatey, 2000:13). Yang pertama itu terkait dengan hak-hak muka seperti harga diri sebagai individu dan kehormatan yang diberikan pada seseorang oleh orang lain sedangkan yang kedua mengacu pada harapan personal atau sosial, kepedulian kelompok terhadap keadilan (*fairness*), pertimbangan sosial, dan penggabungan atau pengucilan sosial. Lebih jauh, konsep muka perlu dirinci lagi menjadi (i) *quality face*, yakni peran yang dimiliki seseorang di dalam kelompoknya; (ii) *identity face*, yang terkait dengan peran yang diberikan pada seseorang oleh orang lain dalam kelompoknya. Disamping itu, konsepsi *Face Threatening Acts* (FTA) juga perlu dipertimbangkan kembali karena FTA bukan sekedar ancaman terhadap citra-diri seseorang melainkan perilaku yang mengancam hak-hak seseorang (*rights-threatening behavior)*, yang

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

merupakan konsepsi umum tentang perilaku seseorang yang adil (*fair*) dan patut (*appropriate)* dalam kelompoknya (periksa Spencer – Oatey, 2000: 16)

Selain pada konsepsi 'muka' teori kesantunan Brown dan Levinson juga mendapatkan kritik dalam hal urutan strategi-strategi kesantunan yang mereka kemukakan. Bagi Blum-Kulka (1992) ranking strategi dan super-strategi tersebut tidak jelas. Ujaran-ujaran yang tak langsung (*indirect)* dan samar (*off-record)* memang ada di dalam setiap guyub tutur tetapi ujaran-ujaran tersebut tidak selalu lebih santun daripada ujaran langsung (*direct*) dan tanpa basa-basi (*bald on record*) atau bentuk strategi kesantunan yang lain. Suatu bentuk ungkapan taklangsung hanya dianggap santun dalam kelompok masyarakat yang memiliki norma dan budaya 'ketidaklangsungan seperti masyarakat Inggris. Di dalam masyarakat yang memiliki budaya 'langsung, seperti Maroko, permintaan yang disampaikan secara tidak langsung dapat dianggap tidak santun karena akan dipahami sebagai isyarat adanya ketidakharmonisan sosial telah terjadi di antara para partisipan komunikasi.

Pembahasan konsep kesantunan dalam perspektif Norma Sosial (NS) muncul ketika pada tahun 1980-an beberapa peneliti internasional seperti Blum-Kulka, Horse dan Kasper berupaya mengkaji realisasi tindak tutur yang terkait erat dengan kesantunan dalam berbagai bahasa di Eropa. Dari berbagai implikasi temuan-temuannya tentang fenomena kesantunan, Blum-Kulka dkk akhirnya mengemukakan teori kesantunan yang mereka sebut dengan Teori kesantunan 'konstruktivist kultural' atau 'kesantunan sebagai naskah kultural' (Watts, 2003: 71; Eelen, 2001).

Pada intinya, pandangan kesantunan Blum-Kulka adalah tentang kepatutan perilaku sosial yang didasarkan pada harapan-harapan atau norma-norma budaya. Blum-Kulka membenarkan bahwa setiap kelompok sosial-budaya tertentu di dunia ini memiliki cara-cara tersendiri dalam mengungkapkan fenomena kesantunan yang bersifat universal. Dengan demikian, ia mendukung teori kesantunan PM yang memandang kesantunan sebagai strategi pelunakan tindak mengancam muka tetapi realisasi bentuk-bentuk pelunakan tindak mengancam muka tersebut mengalami penyaringan budaya (*cultural filtering*), sebagaimana pernyatannya berikut:

> "Pada tataran teoritis, sistem-sistem kesantunan berwujud pemahaman yang tersaring secara kultural yang merupakan hasil interaksi antara empat parameter utama: motivasi sosial (*social motivation*), bentuk ungkapan (*expressive mode*), perbedaan sosial (*social differentials*) dan makna sosial (*social meaning*)… Nosi budaya berperan dalam

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

> menentukan beragam fitur pada setiap parameter tersebut sehingga mempengaruhi pemahaman sosial tentang kesantunan dalam berbagai masyarakat di dunia' (ibid: 1992: 270).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesantunan NS menekankan bahwa setiap masyarakat memiliki seperangkat norma yang mencakup kaidah-kaidah eksplisit yang mengatur perilaku, urusan sosial, dan cara berpikir anggota masyarakatnya (Fraser, 1990:220). Pandangan kesantunan NS mendukung kesantunan PM terkait dengan klaim universalitas kesantunan dalam arti bahwa semua masyarakat di dunia mengenal dan memiliki sistem kesantunan tetapi cara-cara pengungkapan kesantunannya bersifat khusus sesuai dengan harapan dan norma budaya lokal.

8. Kebudayaan dan Pranata Sosial dalam Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu dalam waktu yang cukup lama, yang memiliki tujuan atau cita-cita bersama dan memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan mereka (Soekanto, 1982; Ahmadi, 2003). Karena masyarakat selalu dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah dalam kehidupannya, para anggotanya selalu berusaha memecahkan berbagai masalah dan tantangan tersebut dengan cara berolah akal-budi baik dalam hal yang bersifat materiil maupun non-materiil. Dalam kegiatan berolah akal-budi itulah para anggota masyarakat selalu memeroleh berbagai kecakapan dan pengetahuan baru yang diwarisi dari anggota masyarakat terdahulu dan akan menurunkan kecakapan dan pengetahuan tersebut pada generasinya di masa mendatang. Dengan kata lain, setiap masyarakat selalu memiliki kebudayaan dan berusaha mengembangkan kebudayaan tersebut sampai pada taraf tertentu sesuai dengan tantangan jaman.

Para Sosiolog dan Antropolog telah sepakat melihat bahwa kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat menunjuk pada sejumlah manusia sedangkan kebudayaan menunjuk pada pola-pola perilaku yang khas dari masyarakat bersangkutan (Soekanto, 1982:202). Keberadaan suatu masyarakat hanya dapat dimungkinkan akibat adanya kebudayaan, yang justru timbul karena adanya manusia-manusia yang hidup bermasyarakat.

Secara sosiologis, kebudayaan mencakupi semua hasil cipta, karsa, rasa, dan karya manusia sebagai anggota masyarakat baik bersifat kebendaan maupun kerohanian. Kebudayaan yang bersifat kebendaan terkait dengan hasil cipta dan karsa

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

yang berwujud benda-benda atau barang-barang serta berbagai peralatan pengolahan alam, misalnya: gedung, pabrik, jalan, alat komunikasi dan tranportasi, mesin-mesin, lukisan dan sebagainya. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, kebudayaan kebendaan ini berkembang pesat setelah lahir berbagai IPTEK yang memicu lahirnya revolusi industri. Kebudayaan nonkebendaan meliputi hasil cipta dan karsa anggota masyarakat yang berwujud kebiasaan-kebiasaan, adat-istiadat, keyakinan, keagamaan, ilmu pengetahuan, gagasan, dan sebagainya. Dapatlah disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan jalan atau arah yang diambil oleh para anggota suatu masyarakat dalam bertindak dan berpikir berdasarkan pengalaman-pengalaman yang fundamental (Ahmadi, 2003:54).

Dilihat dari wujudnya, kebudayaan dapat dilelompokkan menjadi tiga wujud: (1) ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan; (2) kelakuan berpola yang dimiliki anggota masyarakat; dan (3) benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1971). Wujud ide, nilai, norma, dan peraturan bersifat abstrak tak dapat diraba yang dapat ditemukan di dalam alam pikiran anggota masyarakat. Wujud ide ini baru dapat dilihat secara kongkret ketika dituangkan dalam tulisan ilmiah, arsip, prasasti, dsb. Wujud kelakuan berpola dapat dilihat ketika manusia-manusia anggota suatu masyarakat melakukan kegiatan interaksi, bergaul, dan berhubungan satu sama lain. Wujud benda hasil karya dapat diraba, dirasa dan bersifat kongkrit dan nyata.

Selanjutnya Koentjaraningrat (1974) merinci ketiga wujud kebudayaan di atas menjadi tujuh unsur kebudayaan, yakni:

1) sistem religi dan upacara keagamaan
2) sistem dan organisasi kemasyarakatan
3) sistem pengetahuan
4) bahasa
5) kesenian
6) sistem mata pencaharian
7) sistem teknologi dan peralatan

Dapat disimpulkan bahwa inti kebudayaan suatu masyarakat terletak pada sistem nilai yang dianut oleh para anggotanya yang mendukung kebudayaan tersebut sehingga mereka secara kolektif memiliki ciri kepribadian khas yang sama. Sistem nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

sehingga harus dianut, dipatuhi, dan dihargai serta apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari (Soekanto, 1982). Dari sinilah maka dikenal pembedaan antara nilai positif dan nilai negatif.

Menurut Koentjaraningrat (1983) sistem nilai suatu masyarakat bersumber pada indikator nilai-nilai yang berupa konsepsi-konsepsi tentang (1) hakikat hidup, (2) hakikat karya, (3) hakikat waktu, (4) hakikat lingkungan alam, dan hakikat lingkungan sosial. Terkait dengan hakikat hidup suatu masyarakat memiliki kemungkinan-kemungkinan konsepsi seperti: (a) hidup pada hakikatnya buruk, (b) hidup pada hakikatnya buruk tetapi harus diikhtiarkan menjadi baik, (c) hidup pada hakikatnya baik. Kemungkinan konsepsi yang terkait dengan hakikat karya dalam suatu masyarakat adalah (a) karya untuk mencapai kedudukan dengan atribut-atribut konsumtif, (b) karya adalah untuk karya, (c) karya adalah untuk meningkatkan karya. Terkait hakikat waktu, kemungkinan konsepnya adalah (a) orientasi ke masa lampau, (b) orientasi ke masa kini, (c) orientasi ke masa depan. Hakikat lingkungan alam mungkin dikonsepsikan sebagai (a) pasrah pada lingkungan alam, (b) memanfaatkan lingkungan alam, dan (c) menguasai lingkungan alam. Yang terakhir, kemungkinan konsepsi pada hakikat lingkungan sosial oleh suatu masyarakat dapat dikonsepsikan sebagai (a) orientasi pada atasan, (b) mengutamakan pribadi, dan (c) penyerasian antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.

Masing-masing kemungkinan konsepsi tersebut menghasilkan nilai-nilai tertentu yang mungkin dianggap positif maupun dianggap negatif. Misalnya, suatu masyarakat yang memiliki nilai orientasi ke atasan sangat kuat akan menganggap bahwa menghargai, menghormati, dan melayani atasan adalah suatu nilai yang positif. Berbagai nilai yang dianut masyarakat inilah yang selanjutnya dikongkritkan sebagai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Norma adalah patokan atau pedoman yang diacu oleh anggota masyarakat untuk berperilaku secara pantas (Soekanto, 1982).

Norma-norma memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat yang berkomitmen menjalani hidup secara bersama dan masing-masing anggotanya saling memandang sebagai penanggung kewajiban dan hak. Terkait hal ini, setiap masyarakat memiliki apa yang disebut pranata sosial atau lembaga kemasyarakatan

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

(*sosial institution*), yang berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social contro*l), yang dapat menjamin terjadinya keserasian dan ketertiban dalam suatu masyarakat.

Pranata sosial merupakan suatu sistem tata perilaku dan hubungan yang berpusat pada kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, (1974). Pengertian serupa diberikan oleh Soekanto (1982:218) yang mendefinisikan pranata sosial sebagai himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma inilah yang memiliki peran penting dalam mengatur pergaulan hidup untuk menciptakan tata-tertib dalam masyarakat. Secara rinci, Soekanto (1982) menjelaskan fungsi pranata sosial sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah-laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan;
2. Menjaga kebutuhan masyarakat; dan
3. Memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), yakni sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah-laku anggota-anggotanya.

Norma-norma di dalam masyarakat memiliki kekuatan mengikat terhadap anggota masyarakat secara berjenjang. Ada norma yang daya pengikatnya lemah dan ada yang kuat. Berdasarkan tingkat daya ikatnya tersebut, norma-norma sosial dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu: (1) cara *(usage)*, (2) kebiasaan (*folkways)*, (3) tata kelakuan (*mores*) dan adat-istiadat (*custom*).

Cara (*usage*) adalah suatu kategori norma yang memiliki daya ikat yang paling lemah diantara kategori norma yang lain. Ia lebih menonjol dalam hubungan antar individu dalam suatu masyarakat. Suatu pelanggaran atau penyelewengan terhadap *usage* tidak mengakibatkan hukuman yang berat melainkan hanya berupa suatu celaan dari individu lainnya. Misalnya cara makan yang baik adalah tidak bersuara. Jika ada seorang individu tidak mengikuti norma atau cara ini maka ia akan dicela oleh pihak lain.

Kebiasaan atau *folkways* adalah suatu kategori norma yang daya ikatnya lebih kuat daripada *usage*. Kebiasan merupakan perbuatan yang diulang-ulang oleh individu anggota masyarakat dalam bentuk yang sama, yang merupakan petunjuk bahwa

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

banyak aggota masyarakat menyukai perbuatan tersebut. Kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat tidak semata-mata sebagai cara bertingkah-laku yang baik tetapi juga sebagai norma pengatur. Penyimpangan terhadap kebiasaan dapat dianggap suatu kesalahan dalam bertingkah-laku. Sebagai contoh kebiasaan menghormat orang yang lebih tua dalam masyarakat Jawa adalah norma kategori kebiasaan.

Tata kelakuan (*mores*) adalah kategori norma yang daya ikatnya lebih tinggi daripada cara dan kebiasaan. Ia mencerminkan sifat-sifat yang hidup dalam suatu masyarakat yang berfungsi sebagai alat pengawas baik secara sadar maupun tidak sadar terhadap tingkah-laku anggota-anggota suatu masyarakat. Tata kelakuan memiliki kekuatan memaksakan atau melarang dilaksanakannya suatu perbuatan oleh anggota masyarakat sehingga secara langsung ia nerfungsi sebagai alat kendali sosial agar para anggota masyarakat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan yang ada. Soekanto (1982) menjelaskan fungsi tata kelakuan dalam masyarakat sebagai berikut: (1) memberikan batas-batas pada perilaku individu dalam suatu masyrakat, (2) mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, dan (3) menjaga solidaritas antaranggota masyarakat.

Adat-istiadat atau *custom* adalah tata kelakuan yang bersifat kekal serta memiliki integrasi yang kuat dengan pola-pola perlaku masyarakat. Pelanggaran terhadap adat-istiadat mengakibatkan berlakunya sanksi yang keras dari masyarakat yang mengakibatkan penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya berupa pengucilan bahkan pengusiran bagi pelanggarnya dari masyarakatnya. Upacara-upacara tradisional khusus atau selamatan yang diadakan oleh suatu masyarakat merupakan contoh dari adat-istiadat. Norma-norma di atas mengalami proses pelembagaan sebelum dapat diterima, diakui, dan dihargai oleh masyarakat.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dikembangkan untuk memberikan arah terhadap proses analisis pada tujuan penelitian. Penggunaan kerangka pikir dalam penelitian ini pada hakekatnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan keadaan lapangan penelitian.

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

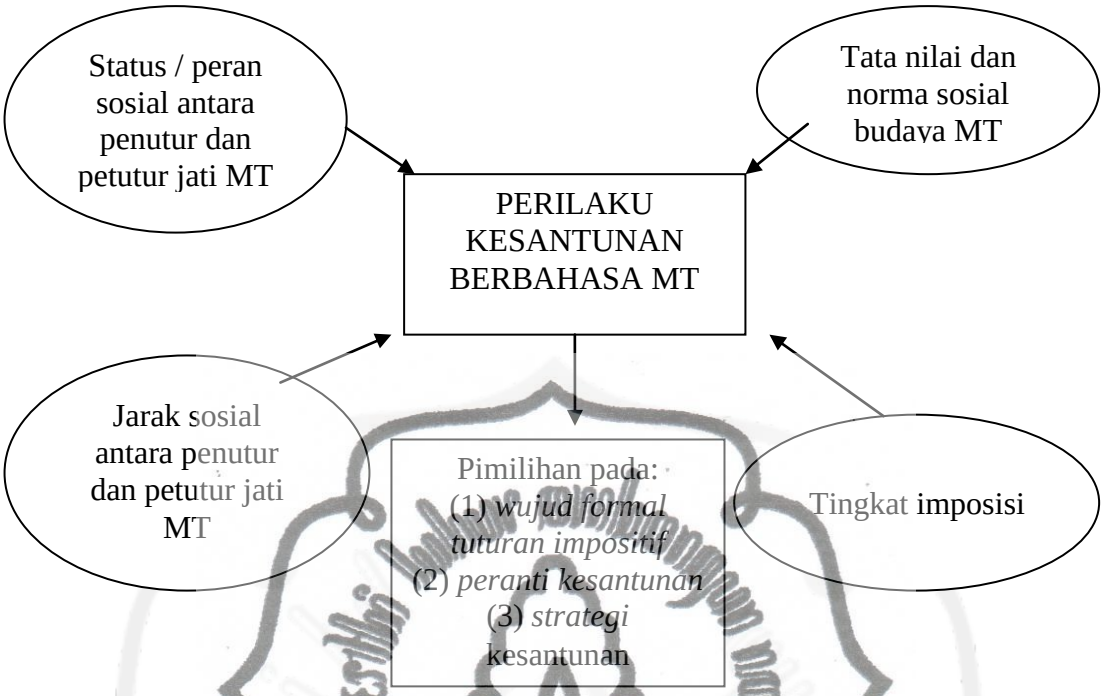

Diagram 2.1. Kerangka Pikir

Secara garis besar kerangka pikir pada penelitian ini dapat disajikan sebagaimana pada diagram 2.1. Secara singkat kerangka pikir yang digambarkan dalam diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Perilaku kesantunan berbahasa MT direalisasikan dalam pemilihan terhadap *wujud formal* tuturan, peranti kesantunan dalam tuturan dan strategi kesantunan ketika warga MT bertutur dalam suatu peristiwa komunikasi. Pemilihan terhadap *wujud formal* tuturan, peranti kesantunan dan strategi kesantunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah status atau peran sosial atau otoritas yang dimiliki oleh penutur dan petutur jati MT yang terlibat dalam suatu pertuturan. Seorang Pn yang memiliki *power* yang lebih rendah daripada Pt akan menggunakan wujud, peranti, serta strategi kesantunan yang berbeda dengan seorang Pn yang memiliki power yang lebih tinggi daripada Pt ketika menyampaikan suatu tuturan. Yang kedua adalah jarak sosial atau tingkat keakraban antara penutur dan petutur MT. Jika seorang Pn memiliki hubungan akrab dengan Pt, maka wujud, peranti, serta strategi kesantunan yang ia gunakan dalam menyampaikan suatu tuturan akan berbeda dengan seorang Pn tidak akrab dengan Pt. Ketiga, tingkat imposisi tekanan terhadap petutur oleh penutur sesuai dengan derajat kesenjangan otoritas dan tingkat keakraban juga akan berpengaruh

commit to user

library.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

terhadap wujud, peranti, serta strategi kesantunan. Terakhir, tata nilai dan norma sosial budaya MT yang dipegang teguh oleh peserta tutur juga akan sangat menentukan wujud, peranti, serta strategi kesantunan yang ia gunakan dalam menyampaikan suatu tuturan yang mengandung tindak impositif.

D. Hipotesis

Perilaku kesantunan berbahasa MT dalam penyampaian tuturan impositif tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor kekuasaan, jarak sosial di antara peserta tutur dan tingkat imposisi tuturan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor tata nilai dan norma sosial budaya MT.

commit to user